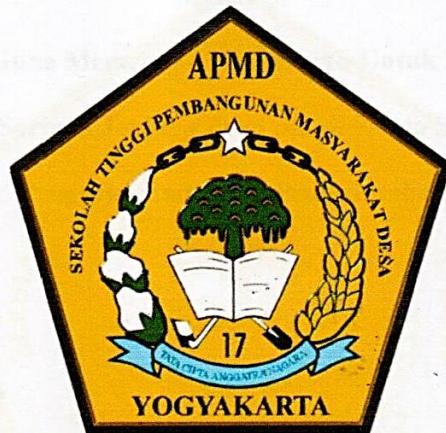


## SKRIPSI

### BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA KALURAHAN

(Studi Di Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi Kalurahan  
Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa  
Yogyakarta)



Disusun Oleh :

ASTRIA ESTU LAILI  
NIM: 20520158

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA

2025



## HALAMAN JUDUL

# BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA KALURAHAN

(Studi Di Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi Kalurahan  
Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa  
Yogyakarta)

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

**YOGYAKARTA**

**ASTRIA ESTU LAILI**

**20520158**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

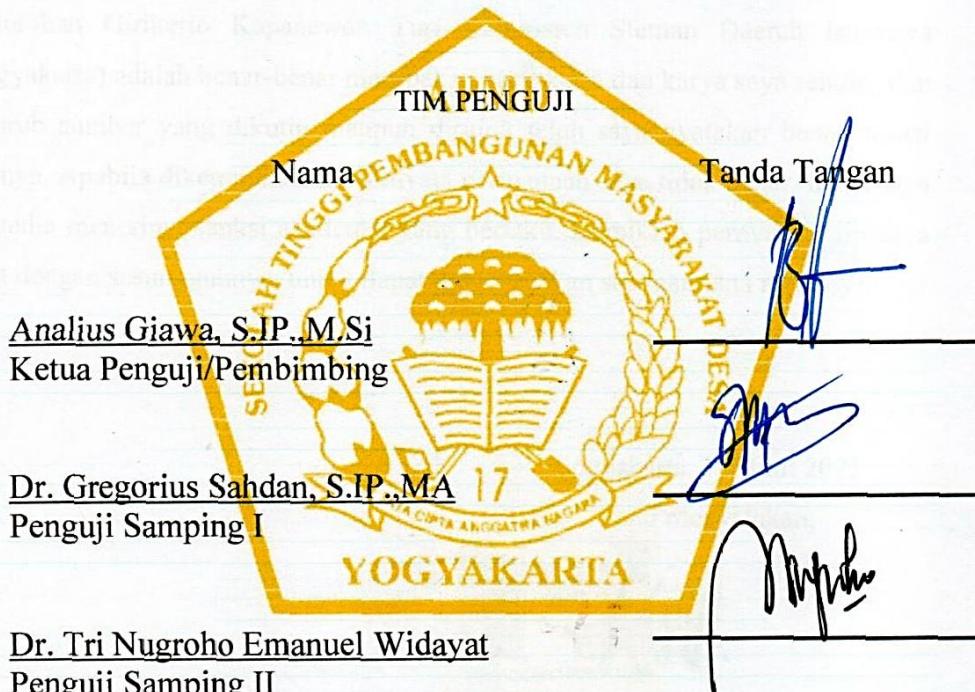
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 20 Juni 2015

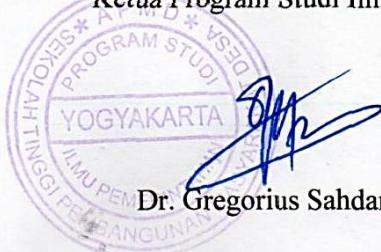
Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astria Estu Laili

NIM : 20520158

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA KALURAHAN” (Studi Di Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Yang menyatakan,



Astria Estu Laili  
20520158

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Astria Estu Laili

NIM : 20520158

Telp : 081393968479

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA KALURAHAN” (Studi Di Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)** beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 20 Juni 2025

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

**Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astria Estu Laili

NIM : 20520158

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA KALURAHAN” (Studi Di Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Yang menyatakan,

Astria Estu Laili  
20520158

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Astria Estu Laili

NIM : 20520158

Telp : 081393968479

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA KALURAHAN” (Studi Di Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”** beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Astria Estu Laili  
20520158

## **MOTTO**

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya jani Allah adalah benar”  
(Qs.Ar-Ruumm:60)

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada  
dirimu sendiri”  
(Qs. Al-Isra:7)

“Tidak ada yang tahu kapan akan mencapai tujuan, dan percayalah bukan  
urusanmu untuk menjawab itu”  
(Hindia)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur saya panjatkan kepada pencipta langit dan bumi dan kuasanya yang luhur. Karena atas berkat dan karunia serta hikmat kehidupan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk terus berjuang dan berkarya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Fatkur Rohman dan Ibu Hernida Selymah, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan perjuangan serta doa yang tidak pernah dilupakan untuk anak-anaknya yang menempuh pendidikan terlebih khususnya kepada saya. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar untuk Ayah dan Ibu saya tercinta.
2. Kepada saudara saya Adib Arohman, Antonius, Ambarwati dan Rupina Rina yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
3. Kepada keponakan saya: Esty, Rara, Sila, Meichel dan Aruna, yang menjadi penyemangat bagi peneliti.
4. Kepada Keluarga besar Bani H Mu'Alif dan Zakaria Mahtung yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih karena telah mengsupport dan mendoakan peneliti agar lancar dalam proses pembuatan skripsi ini Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan YME.

## KATA PENGANTAR

Puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh kudus, Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya yang tak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi dengan Skripsi yang berjudul **“BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA DESA” (Studi Di Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Skripsi tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu, di kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segalah dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan,S.IP.,M.A, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Analius Giawa, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang sudah bersedia membimbing dan membantu saya dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir baik dorongan pemikiran, pengetahuan dan ide atau gagasan yang didapatkan untuk mendukung selesainya Skripsi tersebut.

4. Pemerintah Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah bersedia membantu dan mempermudah saya melakukan penelitian untuk penyelesaian Skripsi ini.
5. Kepada seluruh narasumber dan masyarakat Kalurahan Girikerto yang menjadi narasumber yang suda membantu dan mempermudah untuk menggali dan memerikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk penyelesaian Skripsi ini.
6. Kepada Bapak dosen penguji 1 dan 2 sidang skripsi Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,MA\_ dan Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat atas kesediaan waktu, bimbingan, dan saran yang sangat berharga dalam ujian skripsi saya. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya peroleh dapat bermanfaat bagi saya di masa depan.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. sehingga peneliti mengharapkan kritik dan masukan untuk perbaikan dan penelitian selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik itu para akademisi, praktisi dan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
F. <i>Literature Review</i> .....	9

G. Kerangka Konsep .....	15
1. Kapasitas .....	15
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) .....	18
3. Peningkatan Kemakmuran Warga.....	21
H. Metode Penelitian.....	23
1. Objek Penelitian .....	25
2. Subjek Penelitian.....	25
3. Lokasi Penelitian .....	26
4. Teknik Pengumpulan Data .....	26
5. Teknik Analisis Data .....	29

## **BAB II PROFIL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GERBANG**

<b>MERAPI .....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah Kalurahan Girikerto .....	31
B. Kondisi Geografis Kalurahan Girikerto.....	32
C. Jumlah Penduduk .....	33
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	33
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	34
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	35
4. Keadaan Sosial Kalurahan Girikerto.....	37
5. Keadaan Ekonomi.....	38
D. Kelembagaan .....	41
1. Lembaga Pemerintah Kalurahan .....	41
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).....	43
E. Lembaga Desa .....	44

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) .....	44
2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	46
3. Struktur Organisasi Karang Taruna .....	47
F. Visi dan Misi Kalurahan Girikerto .....	48
G. Pengurus BUMKal Gerbang Merapi .....	51
<b>BAB III BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA DESA .....</b>	<b>53</b>
A. Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal)	
Dalam Membangun Potensi Kalurahan Girikerto .....	53
1. Upaya Sosial dalam pelaksanaan fungsi sosial	
BUMKal Gerbang Merapi .....	59
2. BUMKal Gerbang Merapi Dalam Peningkatan Ekonomi.....	63
3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi .....	67
B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Dampaknya	
Bagi Kemakmuran Masyarakat .....	73
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Daftar Informan Penelitian.....	26
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia.....	33
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	34
Tabel 2. 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	35
Tabel 2. 4. Fasilitas Perekonomian.....	40
Tabel 2. 5. Potensi Ekonomi.....	40
Tabel 2. 6. Struktur Pemerintahan Kalurahan Girikerto .....	42
Tabel 2. 7. Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikerto .....	44
Tabel 2. 8 Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kalurahan .....	45
Tabel 2. 9 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga .....	47
Tabel 2. 10. Struktur Organisasi Karang Taruna .....	48
Tabel 3. 1 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Girikerto.....	77

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2. 1 Struktur Kepengurusan BUMKal Gerbang Merapi 2023-2024....52

Bagan 3. 1 Model Pengelolaan Unit Usaha BUMKal Gerbang Merapi.....70

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kelurahan Girikerto..... 311

## INTISARI

Skripsi ini membahas tentang “BUM Desa Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Desa” (Studi Di BUMKal Gerbang Merapi, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta). Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) oleh Pemerintah Kalurahan sejak 2014 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada melalui Peraturan Kalurahan No. 5/PD.GK/2014 dan Peraturan Desa No.4 Tahun 2021 dengan memanfaatkan potensi dan usaha-usaha yang dijalankan, namun dari hasil pengelolaan dapatkan dipastikan mengalami meningkatkan setiap tahun. Maka adapun pertanyaan penelitian adalah bagaimana Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi dalam memanfaatkan sumber daya di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran, pemahaman dan menggali objek dalam penelitian sehingga dapat menemukan masalah, potensi, dan hasil dalam penelitian ini. Subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian antara lain pemerintah kalurahan, pengurus BUMKal, dan masyarakat, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan, serta dokumentasi untuk memperkuat dan mendukung data hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kapasitas BUMKal Gerbang Merapi dalam memanfaatkan sumber daya desa belum cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada pengelolaan organisasi dan kurangnya sumber daya manusia yang belum cukup maksimal dalam pembangun dan pengelolaan potensi serta adanya pengelolaan usaha Bumkal yang tidak sesuai dengan potensi dimasyarakat misalnya hasil alam yang tidak diorganisir artinya Pengelolaan usaha tersebut tidak berbanding lurus dengan potensi masyarakat di Kalurahan Girikerto yang identik dengan pertanian sehingga hasil alam seperti salak, buah, sayur, dan hasil alam lainnya tidak menjangkau pasar yang lebih luas, dampaknya harga pasar dimainkan oleh tengkulak dan berdampak pada pendapatan ekonomi. Dalam menjalankan pengelolaan organisasi BUMKal seharusnya dapat memperhatikan fungsinya sebagai lembaga ekonomi dan sekaligus sebagai lembaga sosial sehingga tidak terus hanya mengejar keuntungan, namun lupa pada fungsinya dalam hal pelayanan sosial. Kemudian hadirnya BUMkal Gerbang Merapi sejak 2014 bersama Kalurahan Girikerto terus mengalami peningkatan pendapatan 5% setiap tahunnya, namun pada kesejahteraan masyarakat tidak mengalami peningkatan bahkan terdapat masyarakat miskin dan rentan miskin maupun anak yang berkekurangan gizi yang diikuti dengan pendidikan kurang memadai sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Kemudian pengelolaan usaha BUMKal Gerbang melengkapi SPTA, Katering, Susu Kambing, Unggas, dan usaha kerja sama maupun ekowisata bersama masyarakat komunitas.

**Kata Kunci:** Kapasitas, BUMKal, Sumber Daya Desa.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah organisasi wirausaha yang bergerak di desa sebagai badan yang mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh desa untuk kepentingan ekonomi dan peningkatan pendapatan desa. BUM Desa sendiri dibentuk berdasarkan keputusan kesepahaman bersama melalui musyawarah desa. Selain sebagai penggerak ekonomi atau peran ekonomi, juga berfungsi menjalankan pelayanan sosial atau yang disebut peran sosial. Dalam menjalankan usaha-usahanya BUM Desa harus berlandaskan atas kemampuan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia sebagai subjek utama pengembangan dan pengelolaan organisasi.

BUM Desa berdiri atas terbitnya Peraturan Pemerintah NO. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Di dalamnya menjelaskan bahwa fungsi BUM Desa tidak hanya sebagai pelaku penggerak ekonomi tetapi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta bertanggung jawab terhadap urusan bersama yaitu pengelolaan dan pengembangan potensi, serta usaha-usaha yang ditekuni oleh BUM Desa. Hal tersebut sejalan dengan UU No.23 Tahun 2014 bahwa BUM Desa dibentuk harus disesuaikan dengan potensi yang ada.

Dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 tidak berbedah jauh atas dasar hukum berdirinya BUM Desa. Pada pasal 87 berbunyi desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa berdasarkan semangat gotong royong dalam menjalankan usaha dan pelayanan sosial sesuai peraturan yang berlaku.

BUM Desa dikenal waktanya sebagai lembaga sosial dan komersial dalam peningkatan kemakmuran masyarakat harus memastikan potensi alam dapat berfungsi dengan baik dan mengelola desa dengan efisien demi kepentingan masyarakat. Bidang pertanian, wisata, dan perdagangan merupakan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan dan diolah untuk peningkatan pendapatan baik itu ditingkat lokal maupun nasional. Maka perlu kebijakan pemerintah membangun BUM Desa yang mempunyai kapasitas yang cukup menjalankan fungsinya untuk kemanfaatan masyarakat desa yaitu dengan memperhatikan kebutuhan dasar, pelayanan, dan memastikan perputaran ekonomi yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan hasil alam.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah Pendapatan Asli Desa (PAD) maka perlu pengelolaan potensi oleh pemerintahan lokal membentuk BUM Desa merupakan organisasi sosial dan ekonomi yang dibangun Pemerintah Desa dengan tujuan memanfaatkan potensi untuk kebutuhan ekonomi. BUM Desa hadir karena kesamaan nasib diantaranya kondisi lingkungan sosial ekonomi, keterbatasan sumber daya, kepentingan pembangunan maupun tujuan yang sama. BUM Desa hadir atas usaha untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi dan menjadi tempat penyelesaian problem ekonomi di masyarakat dan dapat membangun serta memperkuat kerja sama di antara lembaga-lembaga dimasyarakat untuk tetap bertahan terhadap ancaman ekonomi yang melemahkan kebutuhan hidup.

Salah satu unit badan usaha BUMKal di Kalurahan Girikerto menarik bagi peneliti untuk melakukan pendalaman terhadap usaha-usaha yang dikelola

BUMKal yaitu Desa wisata, Unggas, Cathering, Susu Kambing, dan penyaluran air bersih bagi masyarakat. Kemudian BUM Desa di Kalurahan Girikerto tidak hanya melakukan pengelolaan terhadap hal tersebut, tetapi membangun hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya di Kalurahan diantaranya Kelompok UMKM, Pokdarwis, dan OPD terkait air bersih. Artinya BUM Desa dalam pengelolaan usaha harus-benar mempunyai kapasitas yang mumpuni sebagai organisasi sosial ekonomi. Sehingga dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan tidak mengabaikan pelayanan sosial yang sebenarnya menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari BUMKal.

Pasalnya dengan unit usaha yang dikelola diharapkan nilai ekonomis dari akan membantu meningkat pendapatan kalurahan, akan tetapi permasalahan yang muncul adalah pemasaran, modal usaha, dan sumber daya manusia, banyaknya persaingan pemasaran dalam usaha perdagangan dan produktivitas susu kambing tidak stabil sehingga perlu adanya pendampingan secara rutin oleh Pemerintah Desa bersama BUMKal untuk dapat dimaksimal dari segi penguatan kapasitas. Dalam pengelolaan harus mendapatkan pelatihan atau pendampingan. Pendampingan ini sangat membantu para tenaga kerja dan pengurus BUMKal. Utamanya pemeliharaan setiap unit usaha, sanitasi, sampai dengan penjualan.

Peningkatan keuntungan yang diterima oleh BUMKal dan pengelolaan BUMKal di Kalurahan Girikerto dengan semangat gotong royong dari kelompok kerja sama yang mengelola potensi kalurahan sesuai dengan UU Desa. Sehingga dalam hal ini kesiapan Pemerintah Kalurahan dalam

membangun hubungan secara horizontal dengan kelompok ekonomi lainnya perlu penataan terhadap sistem pengelolaan bersama BUMKal untuk mewujudkan adanya pengembangan ekonomi kalurahan yang efektif, efisien, transparan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Girikerto berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, didalam terdapat kewenangan-kewenangan yang sudah diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa termasuk pengelolaan sumber daya alam untuk kebaikan masyarakat Kalurahan. Mengembangkan, mengelola potensi alam melalui BUMKal dapat berperan membantu mempromosikan produk atau layanan yang dihasilkan oleh BUMKal baik dalam skala lokal maupun regional, guna meningkatkan skala usaha dan pendapatan masyarakat, sehingga peran BUMKal sebagai lembaga sosial dan komersial dalam peningkatan ekonomi masyarakat belum cukup kompleks melihat permasalahan yang dihadapi BUMKal misalnya jangkauan pasar dan keseimbangan harga termasuk peningkatan distribusi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep governabilitas sebagai sudut pandang penelitian agar dapat melihat bagaimana kapasitas Pemerintah Kalurahan Girikerto dan BUMKal dalam pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat untuk memastikan adanya distribusi sosial ekonomi, pelayanan, hingga pada problem sumber daya manusia yang belum mumpuni. sasaran pasar yang tidak meluas yaitu pada pengembangan dan pengelolaan hasil potensi alam Kalurahan yaitu usaha perdagangan Unggas, Cathering, dan kurangnya produktivitas susu. Kurangnya peran Pemerintah Kalurahan dan

BUMKal tentu akan sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada unit usaha kerja sama, sewa, dan hak guna bangunan.

Dalam Sutoro Eko (2021), Konsep munculnya governabilitas awalnya ditandai dengan adanya krisis demokrasi, ekonomi, dan kapitalisme di Amerika Serikat dan negara Eropa sebagian. Kaitannya dengan governabilitas, demokrasi dipahami sebagai vital demokrasi di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sehingga menghasilkan peningkatan dalam aktivitas namun tidak memiliki otoritas yang cukup yang pada akhirnya muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Dalam hal ini secara mendasar akan menimbulkan pertanyaan pengelolaan demokrasi yaitu keraguan tentang penurunan otoritas pemerintah yang menimbulkan keraguan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi jangka panjang. Maka dari itu menurut Samuel Huntington dalam (Sutoro Eko, 2021) perlu adanya keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, otoritas dan demokrasi, juga pemerintah dan masyarakat, serta antara politik dan administrasi.

Dalam Jurnal Governabilitas “Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan” Kapasitas tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep *governability*. Salah satu konsep *governability* tersebut menurut Sutoro Eko dalam bukunya “Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan”, menyebutkan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. Secara harafiah, *governability* berarti *ability of government in governing*, kemampuan Pemerintah dalam memerintah. Terdapat 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

- a. Relasi antara pemerintah desa bersama masyarakat dalam hal memerintah atau *governing*
- b. Negara memposisikan diri sebagai pelaku yang diberikan perintah oleh Pemerintah atau *governed*
- c. Hubungan sebab akibat antara yang memberi pemerintah dan yang diperintah dari segi pandangan ideal interaksi dan tata kelola.

Dalam konteks penelitian ini, maka *governability* dapat menciptakan pola saling ketergantungan dan membutuhkan berdasarkan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan pemerintah dalam hal ini desa mempunyai kewenangan penuh mengatur dan menggerakkan potensi untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Kemampuan pemerintah desa diperlukan menjalankan perintah regulasi yaitu UU Desa, termasuk dalam mengatur urusan potensi lokal untuk kepentingan ekonomi masyarakat.

Pola hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, antara BUM Desa dengan masyarakat harus sejalan dengan kewenangan pembangunan desa yaitu menjadi motor penggerak dimana posisi keberadaan BUM Desa memiliki kewenangan mempercepat aktivitas ekonomi dalam hal pemasaran hasil alam, harga yang tidak stabil serta hal yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan peran memberdayakan ekonomi masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan.

Dari hal tersebut penelitian ini dapat digaji dari sudut pandang (*Gobernability on governabilitas*) otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) yang dimana dapat mengukur sejauh mana kemampuan Pemerintah Kalurahan Girikerto melalui BUMKal dalam mengelola potensi

yang dimiliki dengan beberapa problem yang dihadapi. Sehingga menjadi gambaran kuat dalam penelitian secara mendasar menggunakan governability sebagai sebuah pendekatan. Kemudian dalam konteks pengelolaannya kaitannya dengan distribusi ekonomi, keberdayaan, dan kemampuan pemerintah desa bersama BUMKal dalam membangun dan mengembangkan potensi Kalurahan menjadi gap penelitian untuk melihat kapasitas BUMKal sebagai organisasi ekonomi dan sosial untuk kemanfaatan kemakmuran masyarakat di Kalurahan Girikerto.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana Kapasitas BUMKal Gerbang Merapi Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Desa di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Fokus Penelitian**

Kajian penelitian perlu dibatasi ruang lingkup nya agar dalam pembahasan tidak melebar dan fokus dan terarah dengan baik . Oleh karena itu fokus penelitian ini antar lain:

1. Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dalam membangun potensi Kalurahan Girikerto yang diukur dari aspek organisasi sebagai proses dan wadah usaha, aspek sumber daya manusia, serta aspek sistem dan tata laksana.

2. Kondisi kesejahteraan masyarakat dengan berdirinya BUMKal Gerang Merapi yang dilihat dari pendapatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dalam penelitian ini yang akan dicapai antara lain, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai lembaga ekonomi dan sosial, peningkatan ekonomi dan pengelolaan potensi sumber daya
2. Melihat peran BUMKal dalam peningkatan ekonomi
3. Untuk memahami hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan dalam membangun dan meningkatkan kapasitas BUMKal serta

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan, dalam melihat kapasitas pengelolaan BUMKal melalui pemanfaatan sumber daya potensi yang dimiliki.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan dampak untuk masyarakat umum dan mahasiswa karena dengan adanya penelitian dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait kapasitas BUMKal dalam pemanfaatan potensi Kalurahan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan

## ***F. Literature Review***

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu sebagai salah satu bahan perbandingan berkaitan BUM Desa dalam mengelola potensi atau sumber daya desa dengan tujuan membentuk pembangunan ekonomi desa sehingga penting pada poin ini, melihat penelitian terdahulu untuk membantu peneliti menemukan kebaruan dari penelitian sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “Mendorong Pembangunan Desa Yang Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” yang ditulis oleh Edy Yusuf Anggunanto, Fitri, Edi Wibowo, Dan Darwanto Damarwanti Vol.13, No.1, 2016 melihat peran BUMDes dalam pembangunan desa sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui UU Desa No.6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian melihat bahwa BUMDes dalam melaksanakan usaha-usaha nya telah sesuai dengan fungsinya dan tujuan diberidikan nya BUMDes yaitu peningkatan ekonomi desa. Tetapi dalam pengelolaan nya masih terdapat hambatan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipatif masyarakat, dan usaha yang dijalankan belum cukup berkembang.
2. *Journal of Rural and Development*, Volume 5 No (1), Tahun 2014. Dilakukan oleh Amelia Sri Kusuma Dewi, dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hasil penelitian dari artikel tersebut memperlihatkan kedudukan BUMDesa tidak diatur secara jelas dalam peraturan-peraturan yang ada, sehingga BUMDesa berjalan hanya sesuai dengan fungsi nya

yaitu peningkatan ekonomi. Kemudian dalam pendirian BUMDesa dinilai tidak kompleks dalam pembentukan badan hukum yang sejalan dengan kondisi BUMDesa dilapangan. Akhirnya BUMDesa hanya diharapkan sebagai jalan alternatif pembangunan ekonomi desa.

3. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Tahun 2013 yang berjudul “Strategi pembangunan desa dalam mengentaskan kemiskinan melalui Badan Usaha Milik Dessa (BUMDES). Ditulis oleh Yuni S. Dewi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh diantaranya tujuannya, sasaran, lungkup, prestasi, prakarsa, komunikatif, dan koordinasi. Penelitian ini melihat bagaimana BUMDes menyelesaikan kemiskinan dengan strategi pembangunan yang terencana melalui visi dan misi maupun tujuannya hadirnya BUMDes. Akhirnya BUMdesa harus dapat penyelesaian kemiskinan melalui strategi pembangunan seperti infrastruktur dan percepatan ekonomi melalui program usaha pertanian.
4. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang diterbitkan oleh Niswatun merupakan jurnal ilmu sosial dan hukum V.6, No.2 Tahun 2016. Penelitian ini melihat BUMDes sebagai penggerak pembangunan desa melalui ekonomi yang dikelola bersama-bersama. Usaha-usaha dan gerakan ekonomi harus dilihat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai potensi-potensi desa yang ada. Maka perlu adanya strategi yang terencan untuk pembangunan yang diharapkan. Hal ini, menjadi landasan penulisan artikel tersebut. Hasilnya BUMDesa berhasil mengelola dan mengembangkan usaha-usaha melalui

strategi yang diterapkan yaitu prioritas program pencapaian eMHa yang cukup kompleks dalam bisnis. Dalam pencapaian tersebut masih ada gangguan pengelolaan yang menjadi poin yang diperhatikan oleh BUMDes yaitu pada level kolaborasi/kelembagaan. BUMDes “eMHa” meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dalam produksi produk komersial masyarakat (menjadikan masyarakat sebagai mitra bisnis).

5. Jurnal Penelitian Vol. 18, No. (2), hlm. 131-146, 2020, oleh Nurul Aeni dengan judul “Tinjauan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Pati”. Banyak desa di Kabupaten Pati yang memiliki potensi namun tidak dikelola dengan baik. Keberadaan BUMDes sebagai upaya mempercepat peningkatan dan pengembangan potensi agar meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan status BUMDes di Kabupaten Pati dan (2) mengidentifikasi permasalahan berdasarkan evaluasi kinerja BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* atau campuran. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan BUMDes belum cukup ideal yang mana pengelolaannya masih sebatas hanya menjalankan usaha tanpa adanya target dan strategi seperti simpan pinjam yang perputaran ekonomi hanya mengharapkan bunga penjaman, yang pada akhirnya lupa pada pengelolaan potensi yang dimiliki. Sedangkan disisi lain, BUMdes mengalami keterbatasan modal usaha maupun aset dan berdampak pada pengelolaan laporan yang tidak stabil. Temuan lainnya BUMDes dinilai belum berdampak bagi masyarakat secara ekonomi karena ketidakstabilan

pengelolaan organisasi maupun usaha yang dijalankan. Dasar permasalahannya yang dialami oleh BUMDes keterbatasan sumber daya manusia, kontelasi politik struktural, dan belum menjadi prioritas oleh pemerintah desa.

6. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume1, No (1), Tahun 2020. Dilakukan oleh Dadang Sudirn, Masduki, L. Suparto, Dede S.Nahdi, dan Toto Sumiato dengan judul “Peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapan Desa Panjalin Kidul” dalam artikel ini melihat BUMDes sebagai tonggak aktivitas ekonomi desa yang menjalankan fungsi ekonomi segaligus pelayanan sosial. Kahadiran BUMDes diharapkan menjadi mampu memaksimalkan potensi desa termasuk sumber daya manusianya. Pada umumnya BUMDes di Kabupaten Majalengka terlebih di Desa Panjalingidur mengalami degradasi pengelolaan yang disebabkan keterbatasan penguatan sumber daya manusia dan fasilitas. BUMDesa Mapan Desa Panjalin Kidul memiliki potensi untuk dikembangkan dilihat dari sumber daya manusia (staf manajerial), pendanaan, dan aset yang dapat dikelola. Namun masih belum cukup maksimal mengelola potensi tersebut.
7. Jurnal Pendidikan Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 2, No. 4, 2017, yang berjudul “Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengelola Potensi Pariwisata Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten” yang ditulis oleh Hennidar Pertiwi Arianingrum. Dalam penelitiannya metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian tersebut ia menemukan bahwa BUMDes Tirta Mandiri dalam mengembangkan potensi belum memiliki keahlian yang

cukup dilihat dari aspek sumber daya manusianya, termasuk kapasitas dalam penyedianan infrastruktur. Namun secara teknis dan anggaran cukup bagus. Model kepemimpinan di BUMDes Tirta Mandiri adalah manajemen pastisipatif dan hubungan mitra yang terencana, terorganisir, dan implementasi serta pemantauan.

8. Pemetaan Potensi Desa-Prukades dan pendampingan peningkatan kapasitas BUMDes di Pekon Sukabanjar, Lombok Seminung, Lapung Barat merupakan jurnal yang ditulis oleh Selvi Diana, Teuku Fahmi, Dewi A. Hidayati, dan Astiwi Inaya. Peneliti melihat bahwa untuk mendorong kapasitas perlu melakukan pemetaan potensi terhadap produk unggulan diwilayah desa Prukades sebagai alternatif peningkatan skill. Dari hasil analisis potensi dapat menjadi rujukan atau dasar pengembangan usaha BUMDes di Pekon Sukabanjar. Metode PkM mencakup tiga tahapan, yakni pertama, tahapan pendekatan, mulai dari upaya peningkatan aspek kognitif terhadap peserta PkM hingga tahap pendampingan dan pemberdayaan, kedua, tahap implementasi dengan memperhatikan potensi kekuatan dan kelemahan atas potensi yang akan dijadikan usaha, dan ketiga tahap keberlanjutan program dengan berlandaskan hasil analisis PKM yang dimana BUMdes belum cukup memiliki dampak dalam kesejahteraan masyarakat di Pekon Sukabanjar.
9. Gilang Ramahdani, Yana F. Basori, dan Dine megawati dalam tulisananya jurnal vol.9. No.1, 2022 yang berjudul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kec. Sagaranten, Kab. Sukabumi. Mereka melihat BUMDes di Kecamatan Sagaranten hanya terbentuk secara

kelembagaan tanpa adanya pengelolaan dan pengembangan potensi, yang pada intinya kaku dan tidak tau berbuat apa. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa BUMDes di Kecamatan Sagaranten dalam menjalankan organisasi, usaha-usaha, dan program tidak selaras dengan potensi desa yang mengakibatkan pengelolaannya tidak sesuai dengan tujuan bersama maupun fungsi-fungsi BUMDes.

10. jurnal the studies of social sciences, Vol. 2, No.1, Tahun 2019. Dilakukan oleh Juliana LumintangFonny Jeane Waani. Dengan judul “pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Koka dan Kembes Dua”, hasil penelitian menunjukkan Bumdes belum berjalan dengan baik sesuai dengan aturan pengelolaan Bumdes yang dikeluarkan oleh Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015, maka proses perencanaan bisnis dan analisis kelayakan usaha tidak dilakukan sehingga pemilihan jenis usaha dilakukan secara asal-asalan. Metode dalam artikel ini adalah ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD) pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha Bumdes. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kepengurusan Bumdes kepada para pengurus Bumdes dan perangkat desa agar pemerintah dan para pengurus Bumdes mengetahui pentingnya pengelolaan Bumdes yang benar dengan melakukan perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha.

Dari beberapa kajian penelitian yang dipaparkan oleh peneliti di atas merupakan penelitian terdahulu yang tentu dengan kajian dan sudut pandang yang berbeda-berbeda. Perbedaan secara mendasar dalam penelitian ini dan terdahulu terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian

yang berkorelasi dengan teknik pengambilan data. Sedangkan kesamaannya terletak pada penelitian kualitatif dan ruang lingkup kajian yang hampir sama yaitu berkaitan dengan BUM Desa. Namun dalam penyajian data dan hasil penelitian bisa berbeda, sehingga argumentasi-argumentasi yang dibawa tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu tentang kapasitas BUM Desa sebagai lembaga sosial ekonomi, dalam hal membantu Pemerintah Desa meningkatkan pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi. Maka, penelitian ini hendak ingin menggali lebih dalam tentang kapasitas BUM Desa dalam menjalankan peranya sebagai lembaga sosial dan ekonomi dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat.

## **G. Kerangka Konsep**

### **1. Kapasitas**

Menurut Freddy Rangkuti (2005: 94) kapasitas pemerintah adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu Kapasitas (*capacity*) dapat diartikan sebagai suatu kemampuan. Menurut (Moenir, 2002) kemampuan berasal dari kata mampu yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan yang kemudian bisa menghasilkan barang/jasa yang diharapkan. Kemampuan juga dapat ditujukan kepada keadaan atau sifat seseorang yang mampu melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada atau terorganisasi.

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal/desa bukan hanya sebagai isu yang terus menguat di kalangan desa, lebih dari itu desa isu

tersebut sekaligus sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini dapat diartikan bahwa kapasitas merupakan kemampuan dan keterampilan BUM Desa dalam memanfaatkan potensi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat .

Berdasarkan beberapa di atas maka Pemerintah Desa harus mempunyai kekuatan kapasitas desa dalam menjalankan desa seperti gagasan pengetahuan, *soft skill* dalam menjalankan kewenangannya dalam menciptakan sosial ekonomi yang baik untuk kemakmuran masyarakat, maka pemerintah desa dalam mendorong peningkatan potensi ekonomi untuk kemakmuran masyarakat harus memiliki kapasitas atau kemampuan sebagai berikut:

1. Kemampuan regulasi adalah urusan kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan dan penghidupan di Kalurahan dalam hal memproteksi potensi-potensi sosial ekonomi berdasarkan penjaringan aspirasi
2. Kemampuan responsif adalah kemampuan daya tanggap terhadap fenomena sosial dan kondisi lingkungan yang kemudian menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan maupun peraturan.
3. Kemampuan distributif adalah kemampuan pemerintah kalurahan dalam mengelola sumber daya yang seimbang dan tepat sasaran. Biasanya berkaitan dengan penyaluran hasil pengelolaan potensi.
4. Kemampuan ekstraktif adalah optimalisasi aset yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kebijakan bersama.

5. Kemampuan konekting adalah kemampuan membangun jaringan untuk jangkauan pasar, investasi, dan kerja sama dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Grindle 1997: 22 dalam (Mukdar, 2019: 14) kapasitas dapat dilihat berdasarkan tiga elemen antara lain: kebijakan kapasitas, implementasi kewenangan, dan operasional efisien. Artinya kemampuan menjalankan sebuah organisasi dapat diukur atau dinilai berdasarkan kemampuan membangun, menggerakkan dan merencanakan sebuah proses dalam menentukan keputusan yang bijak antara lembaga-lembaga pemerintah dengan landasan analisis yang tepat. Dampaknya tidak hanya masyarakat namun juga pada tata pemerintahan yang baik merupakan kemampuan melayani yang harus dilihat dan diterima oleh masyarakat umum. Dari tiga elemen tiga tersebut, operasional efisien menekankan pada pelayanan yang efektif dan efisien dengan kualitas yang cukup.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kapasitas pemerintah adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan yang dapat dilihat dari 3 aspek kajian yaitu:

1. Aspek organisasi sebagai wadah maupun proses
2. Aspek sumber daya manusia
3. Aspek sistem dan tata laksana

Dalam penelitian ini kapasitas pemerintah desa dimaknai sebagai kapasitas BUM Desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

## **2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 Ayat (6) berbunyi bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha milik masyarakat yang sebagian besar modalnya berasal dari desa dan dikelola secara mandiri dalam mengoptimalkan potensi desa untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada pasal 89 menyatakan bahwa BUM Desa didirikan dan dikelola dengan semangat gotong-royong dan kebersamaan serta kekeluargaan, yang meliputi fungsi:

- a. Pengembangan usaha
- b. Pembangunan desa
- c. Pemberdayaan masyarakat desa
- d. Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin melalui hibah
- e. Bantuan sosial, dan
- f. Kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran, pendapatan Belanja Desa.

Ciri utama BUM Desa adalah Badan Usaha merupakan milik desa dan pengelolaan bersama-sama dengan masyarakat yang penyertaan modalnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat dengan pengelolaan berdasarkan pada budaya lokal sehingga potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi landasan untuk menggerakkan ekonomi desa. Hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan pada peraturan yang telah disepakati dan tentu pelaksanaan operasional BUM Desa diawasi secara bersama oleh Pemerintah

Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Anggota BUM Desa dan Masyarakat.

Dalam tujuannya BUM Desa dapat membantu dan menopang peningkatan ekonomi di desa sebagai organisasi ekonomi yang sah secara badan hukum untuk membantu masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan serta dapat menaikkan pendapatan desa itu sendiri. Potensi ekonomi desa yang dikelola oleh BUM Desa dilakukan sebagai nilai solutif pengembangan pengelolaan potensi agar dapat menjadi lokomotif penggerak di desa.

Berdasarkan makna dan generalisasi tentang BUM Desa tersebut, dapat diambil kesimpulan yang mana BUMDesa sebagai lembaga ekonomi dan sosial harus dikelola secara mandiri melalui partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dan mampu mengelola serta mengembangkan potensi lokal dengan demikian peran BUM Desa sebagai perintis dan penggerak harus mampu mendorong masyarakat pelaku usaha dan komunitas untuk tumbuh dan maju bersama. Misi sosial inilah yang dapat menjadi landasan BUM Desa dalam melakukan pemulihan ekonomi desa, sehingga BUM Desa sekaligus memiliki dua peran yaitu peran sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga ekonomi. Juga dapat dipahami sebagai Lembaga sosial (*social institution*) merupakan lembaga sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Desa yang dibangun atas kesadaran sosial dengan tujuan membangun sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat dalam (Piotr Sztompka, 2004) lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan adalah pranata sosial. karena lembaga

sosial yang dapat mengatur perilaku masyarakat dan hubungan yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pola hubungan yang terbangun melalui norma-norma masyarakat dinamakan *social-organization* (organisasi sosial) untuk mencapai tujuan tertentu.

BUM Desa selain sebagai lembaga sosial, juga melakukan peran utama sebagai organisasi profit. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam tubuh BUM Desa. Artinya BUM Desa dalam mendorong kegiatan usaha ekonomi dan membantu pembangunan desa juga harus memperhatikan aspek pelayanan sosial. Sebagai lembaga ekonomi, BUM Desa harus mampu menjadi wadah inkubasi aktivitas ekonomi bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah, mengembangkan potensi, sekaligus menjadi lokomotif penghubung produk lokal akibat keterbatasan akses dan harga pasar serta pembinaan berupa program. Sebagai wadah inkubasi ekonomi tentunya dalam membangun usaha dapat memperhatikan dan melakukan penguatan kapasitas dan penggunaan teknologi melalui hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai keahlian sebagai media transformasi pengetahuan dalam mendukung usaha yang sedang dirintis.

Pemerintah Kalurahan Girikerto bersama dengan BUMKal Gerbang Merapi dapat memperhatikan tujuan BUMKal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa antara lain; melakukan kegiatan usaha ekonomi, pelayanan umum, memperoleh keuntungan bagi peningkatan asli desa, pemanfaatan aset, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Pada dasarnya fungsi

hadirya BUMKal membantu Pemerintah Kalurahaan melakukan penguatan ekonomi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa
2. Mengelola dan mengembangkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Membuka lapangan pekerjaan
4. Penyedia kebutuhan dasar masyarakat

Maka, disamping itu melalui kajian penelitian ini BUMKal Gerbang Merapi sebagai lembaga ekonomi tentu tidak terlepas dari kontribusi sosial ekonomi dalam membangun desa di Kalurahan Girikerto. Hal ini salah satu pendekatan yang akan dilihat oleh peneliti seperti kontribusi dan perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli kalurahan (PAKal) untuk mengukur sejauh mana proses peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat sebagai representasi kesejahteraan.

### **3. Peningkatan Kemakmuran Warga**

Kemakmuran warga merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, mampu maju, dan berkembang pada keadaan yang tidak seimbang. Menurut Adam Smith seorang tokoh teori klasik kemakmuran harus diperjuangkan dengan sendiri atau *invisible hand*, tidak bergantung pada negara atas kebijakan. Lebih dalam dijelaskan oleh (Manik, 2013) kemakmuran dan kesejahteraan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemakmuran tercipta apabila pembangunan merata. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa kemakmuran yang tinggi harus berbanding lurus dengan

pembangunan manusia. Artinya kemakmuran dapat dicapai dengan kualitas pembangunan manusia.

Dalam melihat kemakmuran masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa indikator atau keterkaitan antara lain: kualitas sumber daya manusia, keadaan ekonomi, kondisi kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks tersebut, menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terutama keadaan ekonomi harus dilihat sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang seimbang. Badan Pusat Statistik menyatakan indikator penting berkaitan dengan pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kemakmuran dalam satu negara sehingga pemenuhan kebutuhan dasarnya dapat teratasi tergantung bagaimana kondisi ekonomi.

Kemakmuran warga juga salah satu tujuan kehadiran *sosial cumunity* termasuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini, biasanya digunakan untuk meninjau keberdayaan masyarakat yang tidak mampu sebagai kritik terhadap pembangunan masyarakat yang sentral dengan pertumbuhan terutama menjawab masalah kemiskinan akibat kegagalan *trickle down effect* dalam menjanjikan kemakmuran. Pendekatan kebutuhan dasar yang dilakukan kepada kaum terpinggirkan, sehingga kaum miskin dalam hal ini mendapatkan pelayanan sosial. Maka pemerintah tentu mempunyai tanggung jawab membuka akses secara inklusif dan hak masyarakat mendapat pelayanan sosial yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan (Soetomo, 2006).

Jaminan sosial merupakan komponen paling dasar dalam kehidupan masyarakat yang diberikan atas dasar hak kewarganegaraan sebagai bentuk

perlindungan dasar atas ketidakmampuan. Kemudian jaminan sosial juga, mengandung nilai normatif kemanusiaan. Ini sejalan dengan konsep BUM Desa sebagai lembaga sosial. Terciptanya BUM Desa merupakan hasil keberadaan masyarakat komunitas sehingga kehadiran lembaga sosial ekonomi juga membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Oleh sebab itu, kemakmuran masyarakat dapat dikontekstualkan bagi masyarakat marginal dan terpinggirkan melalui jaminan sosial dan gerakan sosial oleh lembaga kemasyarakatan seperti BUM Desa agar terberdayakan dan mampu mandiri (*self Reliance*) secara sosial ekonomi.

Dengan demikian, kemakmuran dapat dilihat berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang dimana dapat sejalan dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat kemampuan Pemerintah Kalurahan bersama BUM Desa dalam menciptakan kemakmuran dengan kapasitas yang cukup melalui pemeliharaan dan pengelolaan aset sehingga proses distribusi hasil ekonomi harus berdampak bagi kehidupan masyarakat baik itu penguatan kapasitas, hidup yang layak, dan pembangunan fisik, bahkan pelayanan yang baik melalui kebijakan, dan akses jangkauan pasar.

## **H. Metode Penelitian.**

Adapun jenis penelitian yang dipakai peneliti yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengarah pada proses pandangan berdasarkan aktivitas tertentu yang kemudian digambarkan

oleh peneliti secara sistematis dan memahami pokok permasalahan yang sedang diteliti. (Creswell, 2023) dalam bukunya “Research Design” menjelaskan metode penelitian kualitatif merupakan cara yang dipakai untuk mendalami dan memberikan gambaran kelompok tertentu mau individu mempunyai masalah sosial atau *problem humanistik*.

Penelitian kualitatif pada dasarnya akan mempunyai fokus pada partisipan penelitian, mengumpulkan data informan maupun data fisik dan juga pengelolaan data secara universal. Tujuannya memahami fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian dalam tugas ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian dalam penelitian kualitatif yang menjelaskan secara kompleks dan terukur sesuai dengan gambaran temuan dilapangan dan menggali pemahaman pada aktivitas kajian tertentu. Menurut (Sugiyono, 2015) metode penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan untuk memahami gambaran gejala dan fenomena masalah-masalah sosial tertentu. Sehingga dalam penelitian peneliti akan menjelaskan dan memahami kapasitas pengelolaan *sosial economi* oleh Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal berdasarkan potensi lokal yaitu perkebunan salak dan cabai milik kelompok tani. Sebelum melakukan pendalaman pada isu pada penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari sumber data sebagai bahan untuk membangun kerangka berpikir dalam penelitian yang merujuk pada buku, jurnal terkait, dan informasi kalurahan yang dituju. Kemudian tentu akan mendapat informasi sebagai landasan membangun argumen dan sudut pandang penelitian dengan tujuan memberikan gambaran mendalam tentang aktivitas

ekonomi yang sedang dikembang oleh BUM Desa sebagai organisasi profit dan sosial.

## **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang difokuskan adalah melihat pemanfaatan sumber daya desa oleh BUMDESA Gerbang Merapi yaitu potensi unit usaha mandiri dan hasil kerja sama bersama lembaga-lembaga di Kalurahan. Adapun pendekatan yang digunakan governability dengan tujuan sejauh mana Pemerintah Kalurhan bersama BUMDESA dalam meningkatkan dan memproteksi ekonomi masyarakat agar terberdaya dan mandiri. Maka peneliti akan memilih Pemerintah Kalurahan Girikerto dan BUMDESA yang mempunyai kewenangan dalam mengatur potensi alam untuk kepentingan ekonomi. Kemudian dari itu, peneliti akan menentukan objek penelitian dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik menetukan sampel penelitian karena dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan kajian lapangan berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan judul yang diangkat sebagai bahan kebutuhan pengolahan dan analisis data yang faktual dan berdasarkan fenomena sosial dimasyarakat.

## **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam kualitatif adalah informan. Dalam penelitian kualitatif informan (Sugiyono, 2015) adalah orang yang memberikan informasi tentang kondisi dan fenomena penelitian. Dalam penelitian tersebut peneliti

memilih Pemerintah Kalurahan, Pengurus BUMDESA, dan masyarakat yang memiliki peran atau hubungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kemudian dari itu, peneliti akan menggali informasi terhadap setiap individu maupun kelompok tertentu yang termasuk dan ikut dalam pengelolaan usaha oleh BUMDESA. Sehingga memudahkan peneliti memahami fenomena sosial ekonomi yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Adapun Subjek Penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Informan Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur (Thn)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Saefudin	58	Direktur BUMDESA
2	Krisna Cahyana	33	Carik Kalurahan
3	Rudy	41	Sekretaris BUMDESA
4	Gowo	45	Masyarakat Petani cabe
5	Endah	38	Masyarakat pokdarwis
6	Marseh	46	Masyarakat petani salak dan cabe
7	Sriwidayati	38	Angota BUMKal dan pengelola susu kambing

*Sumber: data wawancara peneliti 2024*

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dari teknik dalam mencari dan mengumpulkan data peneliti memastikan bahwa data yang digunakan sudah sesuai dan cukup berkualitas. Menentukan informan yang relevan adalah salah satu langkah dalam penelitian

yang dimana harus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Maka dalam mengumpulkan data memerlukan teknik-teknik penelitian yang baik guna mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti selama proses penelitian sebagai acuan selama dilapangan antara lain; observasi, wawancara, dan dokumen.

**a. Observasi**

Pengamatan secara langsung dengan mencatat kejadian atau peristiwa yang ditemukan dilapangkan serta mendapatkan data pendukung penelitian termasuk aktivitas individu maupun kelompok dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Observasi juga merupakan langkah peneliti memahami objek atau ruang lingkup terhadap penelitian yang diteliti untuk mengetahui kondisi lapangan melalui visualisasi untuk mendukung semua informasi yang terima oleh peneliti sebagai dasar melaksanakan kajian terhadap problem yang diteliti seperti pengelolaan potensi, aspek organisasi BUMDESA, dan kapasitas sumber daya manusia yang kemudian disaring sesuai dengan data lapangan.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada informan sesuai dengan topik penelitian serta pendalaman melalui diskusi. Penelitian melakukan wawancara dua arah dan berdiskusi sehingga mampu mendapatkan informasi sesuai dengan topik penelitian yaitu kapasitas BUMDESA memanfaatkan sumber daya potensi di Kalurahan Girikerto. Dalam wawancara peneliti

tentu bersama informan sebagai pelaku utama yang memberikan informasi terhadap topik penelitian yang didukung dengan hasil observasi oleh peneliti.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh informasi melalui data dalam bentuk dokumen seperti arsip laporan pertanggung jawaban tahunan pemerintah desa, profil pemerintahan kalurahan, profil BUM Desa, dan RPJMDES Kalurahan dan dokumentasi lapangan yang dapat mendukung berjalannya penelitian ini sampai dengan selesai. Dukomenitasi digunkana sebagai bahan analisis dan data pendukung temuan peneliti. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Sugiyono (2015: 329) bahwa dokumentasi dapat membantu peneliti memperoleh informasih kemudian ditelah dengab baik oleh peneliti dengan mempertimbangkan data observasi dan wawancara sebagai bahan analisis terhadap masalah. Dalam teknik ini, peneliti berhasil memperoleh data seperti profil Kalurahan Girikerto, Profil BUMDESA Gerbang Merapi, RPJMKal Girikerto 2021-2026, APBKAL Girikerto 2024, dan dokumentasi audio visual. Teknik dokumentasi sangat membantu peneliti selama melakukan kajian lapangan untuk mendukung proses penyusunan dan analisis data sehingga observasi dan wawancara dapat teruji melalui dokumen-dokumen yang autentik dan sesuai dengan fenomena lapangan sebagai pertimbangan peneliti dalam menarik sebuah kesimpulan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2015), analisis data kualitatif merupakan langkah-langkah menyusun data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, fenomena lapangan, dan dokumentasi secara teratur. Langkah ini meliputi menata data ke dalam kategori-kategori, merincikan data ke dalam unit-unit terkecil, kemudian menyusun dalam pola, menentukan mana yang relevan dan mana yang akan diteliti, serta menarik sebuah kesimpulan yang dapat mudah dimengerti oleh peneliti maupun orang yang membaca penelitian ini.

Selanjutnya, tahap analisis yang dilakukan dilapangan oleh peneliti mengikuti model Miles dan Huberman, menurut Sugiyono (2013: 91), yang dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Akarny, dengan berpijak pada pandangan tersebut, proses analisis data yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup melimpah, sehingga penting untuk mencatatnya dengan cermat, detail, dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, Sugiyono (2013: 92) menyatakan bahwa “mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi yang penting, serta mencari tema dan pola yang ada”. Dengan demikian, data yang telah direduksi, termasuk hasil wawancara dan dokumen-dokumen organisasi seperti profil BUMDESA, akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan.

### **b. Penyajian data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart ataupun sejenisnya (Sugiyono, 2013: 95). Penyajian data dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dengan para informan yakni para pemerintah desa dan masyarakat. data penelitian yang sudah direduksi ditulis dengan bentuk yang mudah dipahami agar dapat dengan mudah dianalisis sesuai dengan paham oleh peneliti, kemudian untuk disajikan pada format yang kompleks dan terukur.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Sugiyono (2013: 99) menyatakan bahwa hasil akhir dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang belum pernah diditeli sebelumnya. Penemuan bisa berkaitan dengan penjelasan atau representasi dari suatu objek penelitian sebelumnya samar atau tidak jelas, sehingga setelah proses penelitian, objek tersebut menjadi lebih terang. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan harus dilakukan dengan teliti dan penuh kehati-hatian agar hasil yang diperoleh memiliki mutu yang tinggi dan berdampak pada akar tujuan penelitian. Langkah tersebut penting agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki keabsahan dan menjadi solid dan jelas secara substansial.

## BAB II

### PROFIL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GERBANG MERAPI

#### A. Sejarah Kalurahan Girikerto

Kalurahan Girikerto adalah sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Sebelumnya, Kalurahan Girikerto hanyalah wilayah yang terdiri dari empat kalurahan, yaitu Kalurahan Tanggung, Kalurahan Ngandong, Kalurahan Nangsri Lor, dan Kalurahan Kemirikebo. Lalu, pada tahun 1946, keempat kalurahan tersebut bergabung menjadi satu entitas pemerintahan otonom berdasarkan informasi dari Pemerintah DIY Tahun 1946 mengenai sistem pemerintah kalurahan yang kini dikenal sebagai Desa Girikerto. Girikerto lalu secara resmi diakui sebagai kalurahan baru yang ditandai dengan diterbitkannya Dekrit pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan wilayah-wilayah kalurahan di Yogyakarta. Saat ini, kalurahan Girikerto disusun menjadi satu kalurahan baru yang terdiri dari 13 (tiga belas) padukuhan

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kelurahan Girikerto**



(Sumber : Website Kalurahan Girikerto)

Kalurahan Girikerto saat ini sedang berusaha menata dan mengelola

potensi nya untuk menuju kalurahan yang maju dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat sejak 2014 dengan pemanfaatan potensi oleh BUMDESA yang dikembangkan melalui model bisnis sehingga setiap tahunnya mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan kalurahan.

## **B. Kondisi Geografis Kalurahan Girikerto**

Girikerto merupakan kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Girikerto tidak jauh dari pusat pemerintahan kapanewon yang berjarak sekitar 3 km dan 11 km dari kota Kabupaten Sleman. Jalan akses menuju Kalurahan Gikerto cukup mudah karena kondisi jalan cukup bagus dan layak digunakan oleh kendaraan, walaupun kondisi nya berada pada daratan tinggi dengan kisaran 400-975 MDPL. Luas wilayah nya 1.309,60 Ha serta kondisi kemiringan antara 15° s/d 28° C yang hampir seluruh lahannya digunakan untuk pertanian yang mana sejalan dengan mata pencarian masyarakat yaitu sebagai petani karena posisi nya cocok berada di lereng merapi membuat Kalurahan Girikerto juga memiliki keadaan tanah yang subur dan cocok dijadikan lahan pertanian.

Kalurahan Girikerto dikenal dengan wilayah agraris yang subur sehingga hampir semua masyarakatnya bertani, bersawah dan berkebun. Tanaman yang menjadi komoditas utama ialah salak, tidak hanya itu masyarakatnya juga menanam padi, sayur dan buah – buahan lainnya. Wilayah Girikerto dikenal dengan salaknya, karena salak menjadi komoditas tanaman utama bagi masyarakat kalurahan Girikerto, kalurahan Girikerto memiliki pemandangan yang indah dikelilingi oleh hamparan kebun salak pondoh yang

membentang sepanjang jalan di kalurahan Girikerto. Selain itu, ada beberapa masyarakatnya yang berternak, yang terkenal adalah peternakan kambing etawa, peternakan kambing etawa ini dikenal karena memiliki postur yang bagus dan berukuran besar serta dapat menghasilkan susu yang segar dan bermanfaat bagi kesehatan.

Kalurahan Girikerto memiliki tiga belas padukuhan, yaitu Ngandong, Nganggring, Klopasari, Kemirikebo, Sukorejo, Nangsri, Pancoh, Bangunmulyo, Babadan, Glaghombo, Daleman, Surodadi Lor, dan Karanggawang. Kalurhan tersebut cukup startegis yang dapat dengan cepat memaksimal kan potensi karena memiliki daya tarik wisata yang cukup bagus.

## C. Jumlah Penduduk

### 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah penduduk merupakan total masyarakat yang tinggal disuatu wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti kewarganegaraan setelah umur 17 tahun. Masyarakat yang bertempat diwilayah desa biasanya dikenal dengan penduduk desa artinya mereka yang telah tinggal sejak desa tersebut terbentuk atau masyarakat domisili.

**Tabel 2. 1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia**

No	Usia Penduduk	Jumlah (Jiwa)	Percentase (%)
1	0 - 14 tahun	1.571	19,98
2	14 – 25 tahun	1.474	17,81
3	25 – 50 tahun	2.881	34,80
4	50 – seterusnya	2.352	28,41
<b>Jumlah</b>		<b>8.278</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Profil kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Kalurahan Girikerto memiliki jumlah penduduk 8.278 dengan presentase didominasi oleh usia 25-50 tahun dengan presentase 34,80% dan usai lanjut dari total penduduk menjadi 63,21%. Artinya data tersebut menunjukkan jumlah masyarakat yang cukup produktif sehingga dalam memaksimal program-program kerja oleh pemerintah perlu pertimbangan sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang cukup signifikan dikalangan masyarakat yang berdampak pada pendapatan ekonomi.

## **2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

Masyarakat di Kalurahan Girikerto adalah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani. Dominasi atas matapencaharian ini sejalan dengan kondisi lingkungan Kalurhan Girikerto yang strategis yang dekat dengan Gunung Merapi dan daerah yang cukup dingin sehingga untuk penghasilan rata-rata dari hasil pertanian seperti salak, cabe, bawang, sayur, padi dan jagung menjadi tanaman pokok di Kalurahan Girikerto yang kemudian dipasarkan.

**Tabel 2. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Percentase (%)
1	Petani	3.375	69,36
2	Buruh Tani	467	9,60
3	Pedagang	192	3,95
4	Pegawai Negeri	186	3,82
5	Pegawai Swasta	519	10,67
6	Industri RT	55	1,13
7	Lain – lain	72	1,48
<b>Jumlah</b>		<b>4866</b>	<b>100</b>

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Dari tabel 2.2 menunjukkan bahwa Kalurahan Girikerto adalah Kalurahan potensi akan hasil pertanian dengan jumlah masyarakat petani mencapai 69,36%. Artinya hal tersebut tidak berbanding dengan pekerja formal seperti ASN dan pegawai swasta. Maka, dalam melihat fenomena tersebut pemerintah kalurahan dapat memaksimal potensi untuk kebutuhan peningkatan pendapatan dan ketersedian lapangan pekerjaan. Perlu digaris bawahi bahkan jumlah pegawai swasta hampir sama jumlah nya dengan buruh tani di Kalurahan Girikerto, ini harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah agar dapat melakukan pemberdayaan untuk kepentingan jangka panjang. Maka, peran BUMDESA dapat dioptimalkan untuk menjawab persoalan tersebut.

### **3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan tonggak perubahan. Perubahan atas hidup, pola pikir, karakter, dan bahkan bisa manjamin masa depan yang lebih baik. Pendidikan di Indonesia secara nasional menjadi program prioritas melalui kementerian yang dianggarkan 20% dari pendapatan negara. Negara yang maju tentu terlihat dari kualitas sumber daya manusia yang unggul, ini menjadi garda terdepan pembangunan melalui pendidikan. Begitupun sebaliknya ditingkat pemerintah kalurahan, pendidikan harus dimaksimalkan bahkan dampak dari kurangnya sumber daya manusia bisa membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Maka, untuk melihat pendidikan di Kalurahan Girikerto, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 3.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	PAUD dan Lulus TK	973	15,58
2	Tamat SD/Sederajat	1.613	25,83
3	Tamat SMP/Sederajat	1.261	20,20
4	Tamat SMA/Sederajat	1.818	29,12
5	Akademi/PT	353	5,65
6	Tidak/Belum Sekolah	2.260	3,62
<b>Jumlah</b>		<b>8.278</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kalurahan Girikerto mencapai 8.278 berasal dari lulusan TK sampai dengan perguruan tinggi dan yang belum sekolah. Dari tabel 2.3 memperlihat bahwa di Kalurahan Girikerto pendidikan belum cukup maksimal, hal tersebut dapat dilihat pada angka pendidikan lulusan SD, SMP, dan SMP serta tidak atau yang belum sekolah masih mendominasi. Sedangkan lulusan perguruan tinggi menjadi yang paling terrendah. Hal tersebut sejalan dengan tabel 2.2 bahwa mata pencaharian masyarakat Kalurahan Girkerto yaitu sebagai petani dan buruh. Artinya pendidikan lulusan SD, SMP, dan SMA cukup medominasi dan hanya 5,6% yang melanjutkan pendidikan tinggi.

Maka dalam melihat masalah tersebut, masyarakat di Kalurahan Girikerto adalah masyarakat yang siap bekerja karena tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Salah satu faktornya adalah pasti berkaitan dengan keadaan ekonomi sehingga pemerintah kalurahan harus menjawab persoalan lapangan pekerjaan dimasyarakat, yang walaupun didalam laporan kerja pemerintah kalurahan hampir seluruh masyarakat bekerja disamping wilayah tersebut tidak ada industri.

#### **4. Keadaan Sosial Kalurahan Girikerto**

Sebagian besar penduduk di kalurahan Girikerto berada dalam rentang usia kerja dari dari usia 25-49 (lihat tabel 2.1). Maka ini sangat penting bagi pemerintah kalurahan bersama BUMDESA agar membuka peluang lapangan pekerjaan agar masyarakat yang masih menganggur, sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Meskipun Kalurahan Girikerto masih dalam ranah desa bukan kota, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dari potensi yang ada apalagi didukung dengan status desanya yang sekarang menjadi desa mandiri budaya, yang dimana seharusnya bisa membawa perubahan bagi masyarakatnya.

Dalam hal ini, bukan berarti banyak masyarakatnya yang menganggur, karena masyarakatnya mencari alternatif lain seperti pertanian atau berkebun untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seperti yang sudah diketahui bahwa kalurahan Girikerto dikenal dengan Selain itu, Kalurahan Girikerto juga dikenal dengan salak pondoh. Biasanya kandang kambing dari kelompok ternak berdekatan dengan kebun salak agar pemberian pupuk dari kelompok ternak berdekatan dengan kebun salak, hal ini dilakukan agar pemberian pupuk mudah dilakukan dan tidak mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian, dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Kalurahan Girikerto terlihat masih sangat terjaga dan terjalin dengan baik. Solidaritas dan juga toleransi yang dimiliki oleh masyarakatnya juga masih sangat tinggi, karena masyarakatnya yang saling menghargai satu sama lain. Kebiasaan masyarakatnya dalam bekerja, bergotong royong, dan jalinan komunikasi masih sangat erat satu sama

lain. Dikenal dengan rukun guyub yang masih kental, dikarenakan masyarakatnya ketika ada kegiatan dalam hal apa pun yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, Kalurahan Girikerto juga dijadikan contoh yang baik bahwa kebudayaannya masih tetap terjaga seperti dalam hal bercocok tanam.

Masyarakat di Kalurahan Girikerto memiliki variasi dalam kualitas hidup, di mana beberapa di antaranya berada dalam kondisi ekonomi yang masih kurang baik, bahkan ada yang hidup dalam keterbatasan. Namun demikian, mereka tetap menjaga kerukunan dan harmoni dengan cara melaksanakan pertemuan rutin sosial masyarakat untuk menjalankan program-program sosial seperti kerja bakti, pertemuan ibu-ibu PKK, dan kegiatan kebudayaan seperti desa budaya yang sedang dijalankan.

## 5. Keadaan Ekonomi

Mengandalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai penggerak ekonomi utama oleh warga Kalurahan Girikerto memberikan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, meskipun taraf kesejahteraan tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Meski terdapat penduduk memiliki pekerjaan sebagai ASN dan buruh, banyak di antara mereka yang tetap berkebun atau bertani. Di sisi lain, masyarakat mulai memahami pentingnya pengetahuan dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Beberapa metode yang diterapkan di antaranya bertani dengan sistem jajar legowo, tumpangsari, dan lain-lain.

Masyarakat Kalurahan Girikerto juga bekerja dan memiliki usaha peternakan seperti kambing, sapi, dan ayam. Namun yang saat ini sedang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi adalah pengelolaan susu kambing yang didukung oleh Pemerintah Kalurahan melalui BUMDESA Gerang Merapi. Saat ini mereka memiliki 13 usaha pengelolaan susu kambing yang sedang berjalan dengan harga dan kualitas yang cukup bagus. Hal ini, memberikan dampak ekonomi pendapat masyarakat. Kedepannya perlu adanya jangkauan pasar yang lebih luas agar edaran susu kambing tidak hanya di wilayah Kabupaten Sleman.

Masyarakat berupaya meningkatkan kualitas hidup mereka melalui berbagai cara, salah satunya dengan berwirausaha di sektor usaha kecil dan menengah. Berbagai produk yang dihasilkan mencakup makanan, hasil kerajinan, dan usaha warung rumahan. Di Kalurahan Girkerto sendiri mendukung pelaku usaha dengan memberikan pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan usaha-usaha, terlihat ada sekitar 40-an anggota yang bergerak di kalurahan tersebut.

Banyaknya warung kelontong di setiap padukuhan menunjukkan adanya potensi ekonomi dalam perdagangan. Namun, fasilitas ekonomi umum seperti pasar kalurahan “Nggowo”, pasar ikan, dan pasar kambing belum cukup optimal karena persaingan pasar yang berpengaruh terhadap penjualan. Dalam hal ini, fasilitas ekonomi di Kalurahan Girikerto dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini, sebagai berikut;

**Tabel 2. 4.**  
**Fasilitas Perekonomian**

No	Fasilitas Perekonomian	Jumlah
1	Pasar Modern/Swalyan/Supermarket	1
2	Pasar Tradisional	1
3	Ruko	9
4	Toko (besi, apotek)	1
5	Warung/Kios	119
6	Warung PKL (angkringan dan lain – lain)	8

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa potensi dan pergerakan ekonomi lebih banyak pada warung kios rumahan yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perputaran ekonomi cukup baik dan aktif walalupun pasar kalurahan dan lainnya tidak maksimal. Dalam memperkuat potensi tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat karena Kalurahan Girikerto merupakan desa wisata yang tentu ini mampu mendatangkan perputaran aktivitas ekonomi yang maksimal.

**Tabel 2. 5.**  
**Potensi Ekonomi**

No	Potensi Ekonomi	Jumlah Pelaku Usaha (orang)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Jumlah/ Kapasitas Produksi
1	Klp. Ternak Sapi	123	232	-
2	Klp. Ternak Kambing	268	284	2.022 ekor
3	Klp. Perikanan	131	131	2,5 ton
4	Tahu – Tempe	34	34	-
5	Salon	8	11	-
6	Per Bengkelan	17	-	31 unit
7	Pengolahan Susu Kambing PE	11	26	-
8	Makanan Ringan	41	43	-
9	Penjahit	4	4	-

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Potensi ekonomi pada tabel diatas menunjukkan adanya potensi ekonomi dibidang peternakan yang cukup efektif dan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat menjelaskan kondisi Kalurahan Girikerto yang yang cukup mendukung yang jauh dari wilayah perkotaan tetapi menjadi salah satu pusat tujuan wisata karena kondisi lingkungan yang sejuk. Maka potensi peternakan kambing dengan memanfaatkan susu nya untuk dikonsumsi dapat menjadi produk UMKM dan harus mampu dipasarkan diseluruh Indonesia. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kalurahan dan BUMDESA untuk menunjang pendapatan asli kalurahan.

## **D. Kelembagaan**

Kelembagaan adalah organisasi yang bertanggung mengelolaan dan mengatur urusan-urusan kebijakan orang banyak maupun perorangan. Dalam Pemerintahan Kalurahan terdapat seorang pemimpin bersama dengan perangkan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu secara sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah Kalurahan sendiri bisa disebut organisasi pemerintahan yang harus bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan termasuk soal hidup dan menghidupi. Di Kalurahan Girikerto sendiri menjadi lembaga pemerintahan untuk mengatur dan mengurus terhadap setiap fenomena yang ada.

### **1. Lembaga Pemerintah Kalurahan**

Pemerintahan kalurahan adalah badan dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibawahnya perangkat desa yang berfungsi sebagai elemen pelaksana

pemerintahan. Kepala desa, yang juga sering disebut Lurah, bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan kalurahan dan dipilih secara langsung oleh warga. Dengan terpilihnya Lurah Girikerto, yang berperan sebagai kepala desa dengan fungsi sebagai pejabat politik, ia bertugas mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta hal-hal terkait masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan, Lurah Girikerto dibantu oleh para pamong kalurahan, yang mencakup Carik (sekretaris desa), Tata Laksana, Pangripta, Danarta, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwo, dan Kepala Kewilayahan (Dukuh). Tugas dan tanggung jawab Lurah telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Girikerto No. 2 Tahun 2017 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Girikerto, yang meliputi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga.

**Tabel 2. 6.**  
**Pemerintahan Kalurahan Girikerto**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	H. Sudibya, S. Pd	Lurah
2	Krisna Cahyana, S. H	Carik
3	Hariyana	Kaur Tata Laksana
-	Nurahman	Staf Kaur Tata Laksana
-	Rudi Pramoko, S. Pd	PTT
4	Dwi Rahmat, S. T. P	Kaur Danarta
-	Ani Lusiana	Staf
-	Emi Rahayu, S. I. Pust	Staf
5	Samirin	Kaur Pangripta
-	Robi Hasan, N. C., S. Pd	PTT
6	Edy Sunaryo	Jagabaya
-	Fitri Rahayu, S. Si	Staf
7	Agus Tri Wibowo, S. Kom	Ulu – Ulu
-	Drs. Martono Teguh T	Staf
8	Teguh Raharjo, S. Pt	Kamitua
-	Nur Hayati	PTT

9	Ngadimin	Dukuh Ngandong
10	Samija	Dukuh Nganggring
11	Hermawan	Dukuh Kloposawit
12	Sidik Triyono	Dukuh Kemirikebo
13	Endi Wiratmo	Dukuh Sukorejo
14	Purwadi	Dukuh Pancoh
15	Suwarsono	Dukuh Ngangsri
16	Sihana	Dukuh Bangunmulyo
17	Sudiharja	Dukuh Badadan
18	Maridi	Dukuh Glagahombo
19	R. Wijayatma	Dukuh Daleman
20	Ig. Jumadi	Dukuh Surodadi
21	Supriyono	Dukuh Karanggawang

*Sumber : : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

## **2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)**

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang bertanggung jawab mengatur kepentingan masyarakat lokal, menyerap aspirasi, dan melakuakan pengawasan tata kelola pemerintahan. BP-Kal melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya dalam UU Desa yang pengurusnya dipilih oleh masyarakat berdasarkan musyawarah bersama. Upah pengurus BPKal sudah di atur dalam Peraturan Bupati Sleman No. 11. 1 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati No. 22. 1 Tahun 2019 mengenai biaya operasional dan tunjangan BPKal, sudah diatur secara rinci mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.

**Tabel 2. 7.**  
**Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikerto**

No	Nama	Jabatan
1	Suwarna	Ketua
2	Agus Setyawan	Wakil Ketua
3	Arum Fatwa Khoira, S. Pd	Sekretaris
4	Riyan Pujianto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan
5	Marimin	Ketua Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Abu Mustofa	Anggota
7	Roma	Anggota

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

## **E. Lembaga Desa**

### **1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan salah satu organisasi bertugas memperdayakan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. LPMK dipercayakan dapat memperkuat masyarakat baik secara skill maupun pengetahuan. Pemberdayaan artinya memperkuat yang lemah agar mampu bertahan secara sosial ekonomi, politik maupun budaya. Pendangan terhadap pemberdayaan harus berkelanjutan dan jangan hanya terbatas pada kegiatan semonial yang hanya menciptakan ruang pembangunan terbatas. Masyarakat bertambah dan bertumbuh, namun tidak berkembanga pada nilai-nilai kehidupan. Ini menjadi catatan-catatan yang perli diperhatikan oleh lembag-lembaga pemerbedayaan.

**Tabel 2. 8**  
**Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua I	Ir. Siswantara
2	Ketua II	Wagiman
3	Sekretaris I	Kalis Triyanto S. Pus
4	Sekretaris II	Try dady Widiyanto
5	Bendahara I	Waliyo S. Pd
6	Bendahara II	Sardi S. Pd MM
7	Bidang Pembangunan Fisik	Ir. Priyatmoko Harjanta
8	Bidang Keagamaan	Aekham Lukman
9	Bidang Pendidikan, Pelatihan	Agung Tri Suryanto
10	Bidang Ekonomi	Sunarto Suranto
11	Bidang Budaya	Suhariyanto Murwoto
12	Bidang Pemuda dan Olahraga	Ari Widiantoro

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Peran LPMK sangat mendukung pemerintah kalurahan dalam proses pembangunan kalurahan. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat setempat, LPMK Kalurahan Girikerto juga berperan dalam aktivitas pengembangan sosial, seperti memberikan pemahaman mengenai nilai pendidikan, menjaga lingkungan yang bersih dapat berdampak pada kesehatan dan sektor pariwisata. LPMK ini juga melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan mempromosikan acara budaya yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi.

## **2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi yang fokus pada pemberdayaan dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan setiap keluarga yang berada di desa atau kelurahan. Peran aktif dari PKK memberikan efek positif dengan berbagai program biasanya dilakukan misalnya senam bersama, pengelolaan usaha kecil, sosialisasi kesehatan alat reproduktif, pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan bergerak pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kaurahan

Dalam perjalanan di Kalurahan Girikerto, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat ini hanya melibatkan perempuan. Padahal bicara soal keluarga tidak hannya seorang perempuan disana tetapi laki-laki juga harus terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan program dari yang sangat penting, yaitu pendalaman terhadap Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, manajemen rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan koperasi yang keberlanjutan. Berikut adalah pengurusan terkait pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Girikerto:

**Tabel 2. 9**  
**Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama &amp; Anggota</b>	<b>Keterangan</b>
Pelindung	H Sudibya S. Pd	Lurah Girikerto
Pembina	Teguh Raharjo S. Pt	Kamitua
Ketua	Hj. Winarti A.Md., Keb.	Menyusun Rencana Kerja
Wakil Ketua	Isnaini Okvianing Azizah A.Md. Keb	
Ketua Umum Pokja	Lilis Kusuma Dewi	Pembinaan karakter keluarga, pendidikan, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga dan kesehatan keluarga
Bendahara	Mardiati	
Ketua Pokja 1	Eni Lestari dan 7 anggota lainnya	Penghayatan, pengamalan Pancasila dan gotong royong
Ketua Pokja 2	Anuk Miarsa dan 8 anggota lainnya	Pendidikan dan keterampilan, Pengembangan kehidupan berkoperasi
Ketua Pokja 3	Rumiyani dan 8 anggota lainnya	Pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga
Ketua Pokja 4	Nurhayati dan 8 anggota lainnya	Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat.

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

### **3. Struktur Organisasi Karang Taruna**

Di Tabel 2. 10 diperlihatkan bahwa susunan organisasi karang taruna memiliki peran penting dalam memajukan berbagai aspek pembangunan yang digerakkan oleh generasi muda di Girikerto. Beberapa yang menjadi fokus di antaranya adalah pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kegiatan olahraga, hubungan masyarakat, pengembangan pendidikan, kebersihan lingkungan, pengelolaan wisata, dan kerohanian.

**Tabel 2. 10.**  
**Struktur Organisasi Karang Taruna**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
Ketua Umum	Muiz Yurohmad	Ketua I & II
Sekretaris	Risky Indriyana	-
Bendahara	Anisa Dhifa Nirmalasari	Bendahara II
Kepala Seksi UEP	Ridha Hermawan	Anggota IV
Kepala Rekreasi, ODK	Sidik Nur Hadi	Anggota V
Kepala Seksi UKS	Dwi sutrisno	Anggota II
Kepala Human KDM	Hendri Nur Arbiyanto	Anggota IV
Sie PDP	Risti Dwi Prastiwi	Anggota III
Kepala LHP	Rachmad Bayu Aji	Anggota IV
Kepala KBM	Fajar Yuliani	Anggota III

*Sumber : Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2024*

Karang taruna menjadi organisasi pemuda berperan dan berkontribusi dalam pembangunan untuk pengembangan, penguatan, dan mengurangi kenakalan dilingkungan masyarakat. Dalam organisasi tersebut mulai diikuti oleh usia 17 tahun keatas. Pengelolaan karang taruna juga melakukan berbagai program seperti lomba, usaha kecil, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **F. Visi dan Misi Kalurahan Girikerto**

Visi dan misi suatu adalah hal yang diimplementasikan oleh pemerintahan desa, sejalan dengan visi desa yang telah ditentukan, untuk tujuan meningkatkan pembangunan desa yang lebih baik sesuai harapan, serta meningkatkan sumber daya manusia. Adapun visi Kalurahan Girikerto adalah

sejahtera, mandiri, religius, dan berbudaya dalam lingkungan yang berkelanjutan:

- 1) Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik fisik maupun mental, secara merata. Hal ini juga tercermin dari indeks pembangunan manusia, turunnya angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan peningkatan peluang kerja.
- 2) Mandiri berarti Kalurahan Girikerto mampu memanfaatkan potensi yang ada, seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Sosial Budaya. Pemanfaatan potensi ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Girikerto. Dengan mengidentifikasi peluang yang didukung sarana dan prasarana perekonomian, daya saing dapat tercipta. Ini terlihat dari berkembangnya infrastruktur yang dibangun dan semakin banyaknya investasi yang masuk ke kalurahan. Selain itu, peningkatan pendapatan kalurahan diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pemerintahan kalurahan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Religius menggambarkan upaya manusia untuk menanamkan nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat di Kalurahan Girikerto sebagai wujud syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan visi religius ini, pemerintah kalurahan berusaha mengimplementasikan toleransi antar agama yang berkontribusi pada kerukunan dan stabilitas pemerintahan dalam keberagaman agama di Kalurahan Girikerto.
- 4) Berbudaya berkaitan dengan lingkungan yang lestari, yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan membina serta mendidik

mereka tentang tatanan sosial yang kaya akan nilai dan norma dari leluhur, sehingga warisan budaya lama tetap terjaga. Hal ini diharapkan dapat menciptakan warisan budaya yang baru dan khas dengan melibatkan masyarakat dalam seni dan pelestarian tradisi yang dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kalurahan Girikerto.

Sementara itu, misi dari Kalurahan Girikerto untuk mewujudkan visi di atas antara lain adalah:

1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan merombak sistem pelayanan agar tidak hanya sekedar melayani, tapi juga berperan sebagai pemimpin yang melindungi, menghormati, dan memberikan teladan di tengah masyarakat.
2. Mengatur kinerja pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau individu tertentu.
3. Menciptakan masyarakat Girikerto yang aman dan nyaman.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta memperkuat BUMDESA sebagai pelaksana dan pengelola dalam menjalankan usaha atau bisnis yang terorganisir.
5. Merencanakan pembangunan berdasarkan prioritas yang berfokus pada kebutuhan, manfaat, dan dampak yang berkelanjutan.
6. Mencari potensi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan warga
7. Memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan.

8. Menjaga harmonisasi internal dan antar umat beragama menuju masyarakat Girikerto yang menjunjung tinggi prinsip toleransi.
9. Mengadakan pelatihan dan pengembangan dalam hal iman dan ketaatan kepada Tuhan yang Mahakuasa.
10. Meningkatkan mutu pendidikan.
11. Memperbaiki kesehatan masyarakat dengan melaksanakan program bantuan medis melalui fasilitas kesehatan dan layanan yang ada.
12. Melestarikan warisan budaya dengan menyelenggarakan acara budaya secara rutin dan terencana.
13. Meningkatkan pengelolaan administrasi

## **G. Pengurus BUMKal Gerbang Merapi**

BUMDESA merupakan salah satu lembaga yang ada di kalurahan yang dibentuk atas inisiatif pemerintah kalurahan melalui musyawarah bersama masyarakat dengan status hukum tersendiri. Di Kalurahan Girikerto sendiri memiliki BUMKal yang berdiri sejak 18 September 2014 sesuai dengan Peraturan Kalurahan No.4 Tahun 2021. Tujuannya jelas yaitu untuk mengelola potensi ekonomi dan membantu pemerintah kalurahan meningkatkan pendapatan asli kalurahan sejak 2014. Bumkal mempunyai penanggung jawab secara kelembagaan melaksanakan dan menjalankan program dari potensi lokal yang sudah disusun sesuai dengan kemampuan penganggaran.

Adapun beberapa usaha di Kalurahan girikerto yang dijalankan oleh BUMKal Gerbang Merapi sebagai berikut; usaha unggas, pengisian ari tengki, pengelolaan susu kambing, pengembangan umkm melalui catering,

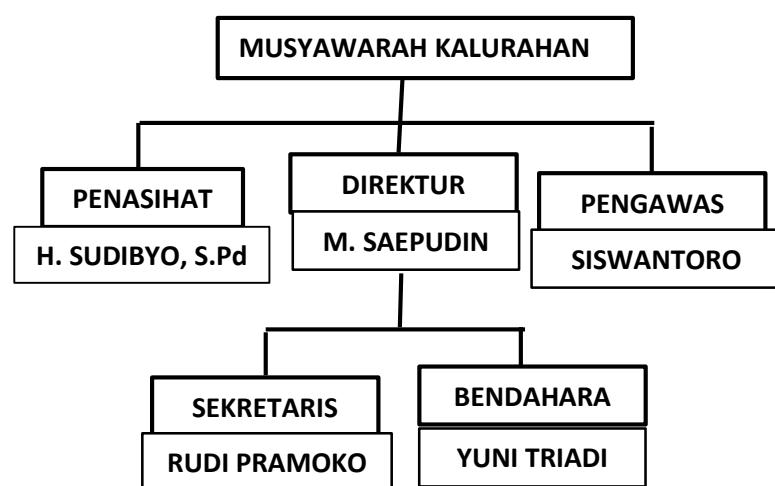
dan usaha kerja sama bersama masyarakat komunitas misalnya kampung wisata pancoh, dalamen asri, sewa lahan, tegal logod, dan berapa usaha *holding* lainnya.

Saat ini BUMKal Gerbang Merapi telah menyerap 60 tenaga kerja atas usaha yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hadirnya BUMkal di Kalurahan untuk mengatasi lapangan pekerjaan yang minim. Makanya dalam pengelolaan diperlukan sumber daya manusia yang cukup agar mampu menjawab persoalan-persoalan sosial ekonomi. Artinya tidak hanya urusan pendapatan tetapi pelayanan sosial juga dapat diperhatikan.

Dalam menjalankan BUMKal Gerbang Merapi ini juga diperlukannya suatu kepengurusan sebagai tim penggerak, agar semua bisa berjalan baik, kemudian tujuan dapat terlaksana serta sesuai dan tepat sasaran. Pada BUMKal ini terdapat kepengurusannya masing-masing sesuai dengan bidangnya.

### **Bagan 2. 1**

#### **Struktur Kepengurusan BUMKal Gerbang Merapi 2023-2024**



*Sumber : dokumentasi peneliti di sekretariat BUMKal*

## BAB III

### BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA DESA

#### A. Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Dalam Membangun Potensi Kalurahan Girikerto

Dalam meningkatkan ekonomi desa pemerintah desa bersama lembaga terkait yaitu BUMkal dalam membangun dan mengelola potensi yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan desa menjadi fokus dari BUMkal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Bandan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Kapasitas menjalankan usaha dibidang ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi potensi Kalurahan.

Desa/Kalurahan Girikerto memiliki potensi yang cukup signifikan antara lain bidang pertanian dan budidaya salak serta destinasi pariwisata, usaha unggas, air bersih merupakan potensi Kalurahan yang perlu dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan bersama BUMkal. Proses pembangunannya harus melibatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan Kalurahan. Pembangunan dalam hal ekonomi desa, keberdayaan masyarakat petani, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Sehingga kapasitas BUMkal sebagai lembaga sosial dan ekonomi harus berdasarkan kesepahaman bersama termasuk *civil society*.

Melihat beberapa penjelasan di atas terkait dengan kapasitas, dapat kita lihat bahwa kapasitas merupakan kemampuan dan keterampilan dari setiap

individu maupun organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pemahaman tentang kapasitas dalam konteks kelembagaan atau institusi pemerintah pada umumnya terdapat tiga aspek yang sering menjadi fokus kajian terhadapnya, yaitu:

- b. Aspek organisasi sebagai wadah maupun proses,
- c. Aspek sumber daya manusia,
- d. Aspek sistem dan tata laksana.

Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang dikelola secara bersamaan dan pada umumnya dimaknai sebagai institusi (Moenir, 2002).

Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) adalah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi dan sosial dengan tujuan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 6 menegaskan bahwa pemerintah desa dapat membentuk badan usaha guna meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi desa. Pemerintah Kalurahan Girikerto melalui Peraturan Kalurahan No. 5/PD.GK/2014 dan Peraturan Desa No.4 Tahun 2021 membentuk BUMKal Gerbang Merapi pada `18 September 2014. Hadirnya BUMKal Gerbang Merapi bersamaan dengan hadirnya UU Desa. Artinya Pemerintah Kalurahan benar-benar memanfaatkan kondisi dan situasi atas kehadiran UU Desa dengan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal. Dalam hal ini Pemerintah Kalurahan dalam pembentukan tidak gegabah membentuk BUKal Gerbang Marapi. Hal tersebut hadir atas dasar musyawarah dengan BPKal, Pemerintah Desa, kelompok

masyarakat, dengan tujuan mencapai pembentukan BUMKal. Hal tersebut, sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang disampaikan oleh Jurgen Hubermas yang memfokuskan pada ruang publik partisipatif yang dinamis untuk membentuk sebuah kebijakan sah dan mengikat. Sebagai negara pluralistik ruang-ruang publik harus didorong sampai pada tingkat lokal. Begitu pun juga dengan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dalam proses pembentukan BUMKal sebagai organisasi sosial ekonomi yang badan hukum yang sah dimata masyarakat.

Dalam wawancara bersama direktur BUMKal Pak Krisna Cahyana Carik Girikerto mengatakan kepada peneliti bahwa :

“Pembentukan BUMKal memang kami bangun sejak UU Desa disahkan. Kami cukup memahami bagaimana membangun desa ini agar ekonomi masyarakat dapat berjalan. Disisi lain juga masyarakat sebagian besar sini lulusan Sekolah Menengah Atas dan aktivitasnya di pertanian. Jadi potensi alam ini bagi kami sebuah anugerah yang harus dikelola dengan baik. Jelas sekali dalam peraturan itu bahwa Pemerintah Desa harus membentuk badan usaha. Sehingga pada waktu itu saya bersama pemerintah dan teman-teman langsung membuat forum musyawarah untuk pembentukan lembaga usaha yang dimiliki oleh desa”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Pak Carik Krisna bahwa pendirian BUMKal diinisiasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama tokoh masyarakat yang dimana hadir karena keberadaan potensi Kalurahan yang memungkinkan sebagai tombak peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian hadirlah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.13 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada pasal 5 menegaskan bahwa dalam pembentukan BUM Desa harus melalui Musyawarah Desa berdasarkan kondisi ekonomi, pengelolaan organisasi, modal, dan AD/ART BUM Desa. Sehingga pertimbangan pembangunan BUMKal Gerbang Merapi

oleh Pemerintah Kalurahan sudah sesuai dengan jalan usaha aktivitas ekonomi dan potensi Kalurahan yang sudah dirintis sejak 2014.

Tujuan pendirian BUM Desa harus sejalan dengan visi misi berdesa dan berusaha sehingga pendapatan desa menjadi dasar pembangunan desa diberbagai bidang terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat. Tujuan hadirnya BUMKal tidak jauh dari konsep perekonomian desa dan pelayanan sosial. Dalam hal ini peningkatan aset Kalurahan, peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan pekerjaan, serta peningkatan usaha masyarakat untuk pembangunan pendapatan masyarakat desa merupakan tujuan pembangunan BUMKal yang harus diselesaikan melalui pembangunan BUMKal. Aktivitas ekonomi yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam wawancara lebih lanjut bersama Pak Carik menegaskan kepada peneliti bahwa:

“dalam pembentukan BUMKal Gerbang Merapi kami mempunyai visi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi Kalurahan. Karena gini Mbak masyarakat disini sejak tahun 2012 sudah sadar akan keberlangsungan pembangunan ekonomi khususnya di Dusun ekowisata Pancoh. Namun dari dulu keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala yang cukup krusial yang kami hadapi”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Terlihat dalam pengelolaan BUMKal Gerbang Merapi mengalami beberapa kendala dalam hal sumber daya manusia. Visi dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMKal. Sehingga dalam melaksanakan pengelolaan organisasi BUMKal Gerbang Merapi dapat memberikan pelayanan dan mampu memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat. Sehingga kapasitas BUMKal dalam pengelolaan dapat diperkuat untuk mencapai tujuan berorganisasi.

UNESCO (2006) Dalam (Fatimah, 2021) pembangunan kapasitas dapat dilakukan kemampuan individu dalam berorganisasi untuk melakukan fungsinya, menyelesaikan masalah, dan objektif melihat maupun menjawab kebutuhan organisasi. Pengembangan kapasitas tidak hanya menjadi perhatian pengurus atau pelaku usaha dalam BUMKal tetapi campur tangan Pemerintah Kalurahan dan masyarakat adalah daya dukung (*supporting*) dalam membangun BUMKal dengan potensinya.

Dalam hal ini kaitannya dengan konsep governability bagaimana Pemerintah Kalurahan bersama BUMKal membangun ekonomi melalui pengelolaan potensi belum maksimal karena mengabaikan kualitas sumber daya. Potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Girikerto yang dikelola oleh BUMKal Gerbang Merapi yaitu PAMDes, Desa Ekowisata Pancoh, Kampung Wisata Daleman Asri, Bumi Perkemahan Lembah Merapi, dan Tegal Loedood. Dengan potensi yang ada Pemerintah Kalurahan Girikerto wajib membangun BUMKal untuk mengelola aset-aset desa untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Sehingga diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang memungkinkan. Dalam pembangunan BUMKal Gerbang Merapi awalnya mengalami kewalahan sumber daya manusia, namun dengan semangat berdesa melalui UU Desa potensi-potensi lokal harus dimanfaatkan berdasarkan cita-cita bersama. Dalam wawancara lebih lanjut bersama Pak Saefudin Ketua BUMKal mengatakan bahwa:

“BUMKal di Kalurahan Girikerto “Gerbang Merapi” sejak 2014 kami sudah mulai mengelola beberapa potensi disini. Tadi Mbak awalnya kami kewalahan dalam pengelolaannya, namun karna kerja keras dari berbagai pihak akhirnya bertahan hingga saat ini dan berhasil membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Semua itu kami bangun dari bawah.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Kapasitas BUMKal Gerbang Merapi cukup baik dalam membangun potensi sejak 2014. Pengelolaan dan pembangunan BUMKal memiliki historis yang cukup krusial hingga mendapatkan hasilnya. Pada tahun 2024 APBDes Kalurahan Girikerto mencapai Rp. 7.629.183.116.00 dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu Rp. 493.102.000.00 (APBDes Kalurahan Girikerto 2024). Dari data di atas pengelolaan potensi dan dana desa terbukti memberikan kontribusi ekonomi bagi Kalurahan Girikerto. Walaupun dalam pengelolaan badan usaha masih memerlukan sumber daya yang mumpuni dalam bidangnya termasuk pengelolaan organisasi.

Terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh direktur BUMKal dalam membangun BUMKal Gerbang Merapi antara lain; Pertama, Pemetaan Potensi wilayah Kalurahan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui dasar dan landasan pembangunan BUMKal berdasarkan UU Desa No.6 Tahun 2016. Artinya pemetaan potensi memiliki tujuan untuk mengetahui aset-aset desa yang akan dikelola sehingga dalam pengelolaan dan pembangunannya tidak lagi sebatas formalitas kelembagaan tetapi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Menurut pandangan peneliti bahwa formalis administratif biasanya menghidupkan sikap teknokrat dalam tumbuh organisasi yang dimana bentuk dokumen dan prosedur dalam pengelolaan administrasi sudah cukup maju namun lupa pada tujuannya sebagai badan usaha yang berwatak sosial.

Kedua, pembangunan kapasitas (*capacity Building*) dalam pengelolaan BUMKal terus dikembangkan oleh pengurus bersama Pemerintah Kalurahan. Pelatihan-pelatihan seperti peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan

lembaga akademisi, praktisi, dan LSM terus dilakukan. Sejak 2015 Pemerintah Kalurahan telah berusaha membangun potensi dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat agar pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan harus menggambarkan keadaan sosial masyarakat.

Ketiga, peningkatan usaha masyarakat lokal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan BUMKal. Usaha-usaha kecil yang dikelola BUMKal dan usaha mandiri masyarakat terus dikembangkan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung berjalannya desa wisata atau gelar potensi. Produk-produk lokal yang diwadahi oleh UMKM Giri Sembada seperti pengelolaan susu kambing kerja sama dengan BUMKal Gerbang Merapi, Gathering, Bolen Salak, dan makanan olahan hasil alam seperti pisang, singkong, dan buah Salak. Potensi alam yang dikelola oleh UMKM bersama BUMKal menjadikan Kalurahan Girikerto sebagai Kalurahan yang kreatif dan inovatif sehingga kegiatan-kegiatan gelar potensi Kalurahan dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Dalam melihat kapasitas BUMKal Gerbang Merapi dapat peneliti memfokus pada aspek organisasi BUMKal sebagai organisasi sosial dan ekonomi, sumber daya manusia, dan pengelolaan sebagai dasar melihat kapasitas itu sendiri dalam penelitian yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawa ini;

## **1. Upaya Sosial dalam pelaksanaan fungsi sosial BUMKal Gerbang Merapi**

Badan Usaha Milik Kalurahan sebagai lembaga sosial merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh BUMKal dalam membangun dan mengelola badan usaha berbasis sosial. BUMKal sebagai organisasi usaha yang didanai

oleh Kalurahan selain menjalankan aktivitas usaha juga berperan aktif dalam menciptakan modal sosial masyarakat Kalurahan. Artinya peran BUMKal dalam masyarakat secara tidak langsung menjadi lembaga yang mewadahi pelayanan sosial masyarakat dan dapat berpihak terhadap *problem social* yang sedang dihadapi masyarakat.

Dalam Permen desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada pasal 19 mengatur dua fungsi BUM Desa yaitu menjalankan peran ekonomi dan pelayanan umum dalam masyarakat sehingga dalam pengelolaannya BUMKal dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menciptakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan masyarakat (Bin Abdullah, 2021). Jika peneliti melihat dari sisi kapasitas BUMKal Gerbang Merapi bahwa dalam pengelolaan potensi nya sudah cukup memperhatikan pelayanan sosialnya melalui program-program antara lain pelayanan air bersih gratis yang diambil di bawah kaki Gunung Merapi, sehingga kapasitas BUMKal Gerbang Merapi dalam pengelolaan potensi harus *balance* yang dimana otoritas menjalankan organisasi harus seimbang dengan kepercayaan masyarakat, antara kebebasan dan kekuasaan harus diwujudkan melalui kebijakan publik.

Dalam wawancara lanjutan bersama Pak Saefudin memberikan sedikit penjelasan dalam menjalankan usaha oleh BUMKal Gerbang Merapi antara lain:

“Dalam proses pengelolaan potensi dalam menjalankan usaha kami benar-benar fokus pada pelayanan sosial misalnya pelayanan air bersih tanpa pemungutan biaya. Program ini kami bekerja sama dengan OPD dalam pelayanan air bersih. Selain itu juga Mbak BUMKal disini memperhatikan peran usaha masyarakat yang dibangun bersama UMKM sehingga event-event yang pameran merupakan alternatif

dalam membangun potensi sosial dan sumber daya hasil alam”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Dari penjelasan di atas menunjukkan peran sosial yang dilakukan oleh BUMKal di Kalurahan Girikerto. Spirit pengelolaan oleh BUMKal sesuai dengan visinya yaitu kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa BUMKal betul memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti air bersih. Dalam pengelolaan potensi yang masyarakat dilakukan juga berfokus pada aktivitas wisata sehingga sedikit mengabaikan aktivitas sosial. Padahal Kalurahan Girikerto memiliki potensi pertanian yang cukup bagus termasuk tanaman salak dan cabai sejenis. Namun hingga saat ini BUMKal Gerbang Merapi membangun dan mengelola organisasi lebih fokus pada pengamanan aset-aset Kalurahan dengan cara disewa. Wawancara lebih lanjut dengan Pak Carik Krisna Cahyana menegaskan bahwa:

“Saat ini BUMkal Gerbang Merapi mengalami peningkatan dalam mengelola aset. Sejak kehadiran BUMKal kami berusaha membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Ada beberapa sumber daya yang dikerjasamakan seperti tanah kas desa, bangunan, alat produksi, usaha peternakan kambing dan unggas, dan usaha catering dan kuliner. Semua itu kami kelola dan kami manfaatkan untuk membantu Kelurahan dalam meningkatkan pendapatan”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Pengelolaan aset yang dikembangkan oleh BUMKal Gerbang Merapi dimanfaatkan dalam bentuk kerja sama seperti sewa-menyewa, bagi hasil, wiralaba, titip jual, dan kerja sama pemanfaatan. Namun yang menjadi perhatian peneliti adalah dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset BUMKal lebih memperhatikan partisipatif masyarakat dalam peningkatan usaha. Ini menjadi modal dan pelayanan sosial yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kalurahan bersama BUMKal sebagaimana yang dimaksud oleh UU Desa

bahwa pemanfaatan potensi harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Namun yang sangat disayangkan bahwa beberapa usaha dalam bentuk kerja sama seharusnya BUMKal dapat mengelola dengan mandiri sehingga masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan dapat terserap dan berdampak secara ekonomi, yang mana kemandirian yang dimaksudkan peneliti bahwa pengelolaan tidak harus “sendiri” tetapi menjadi bagian yang dikelola BUMKal bukan dengan sistem bagi hasil.

Dalam pemahaman peneliti bahwa BUMKal sebagai badan usaha seharusnya tidak lagi membangun potensi atau aset melalui kerja sama tetapi berdikari membangun usaha dengan konsep keberdayaan masyarakat. memperhatikan pengelolaan jangka panjang adalah modal ekonomi yang seharunya dimilik oleh BUMKal Gerbang Merapi. Artinya peran sosial BUMKal oleh daya dukung dana desa oleh Pemerintah Kalurahan terdapat *trickle down effect* yang dimana peran pemilik modal lebih diperuntungkan dalam pengelolaan potensi.

Kehadiran BUMKal sebagai lembaga sosial cukup optimal walaupun terdapat tidak keseimbangan antara peran dan modal pengelolaan dan pembangunan BUMKal. Sedangkan Pemerintah Kalurahan memandang kehadiran BUMKal sebagai media menjalankan aset-aset Kalurahan. Sehingga Secara normatif BUMKal berjalan sesuai dengan kesepahaman bersama tetapi gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Karena kemampuan regulasi dan ekstraksi belum cukup kompleks dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal Gerbang Merapi.

## 2. BUMKal Gerbang Merapi Dalam Peningkatan Ekonomi

BUMKal Gerbang Merapi menjadi salah badan usaha lembaga dengan memanfaatkan potensi untuk membangun kerja sama dengan berbagai lembaga termasuk Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan pendapatan usaha bersama Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal harus memastikan bahwa sebagai lembaga yang menjalankan usaha dapat melihat kapabilitas sebagai faktor terpenting. Pengetahuan, kreatif, dan nilai-nilai sosial merupakan konsep dasar dalam pembangunan Kalurahan. Kemampuan menjalankan dan mengelola tanpa merubah sosial budaya masyarakat. Kalurahan Girikerto sebagai Kalurahan Mandiri budaya tentu menjalankan berbagai sektor termasuk pariwisata dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya budaya dapat lihat sebagai *passive income* yang dimainkan dalam arena desa wisata.

Dalam perkembangannya BUMKal di Kalurahan Girikerto memiliki manajemen yang kurang baik disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia mumpuni. Sehingga BUMkal dalam memainkan peranya sebagai lembaga ekonomi dan perdagangan. Peningkatan ekonomi oleh BUMKal sebagian besar mengarah pada konsep ekonomi *passive income* dengan pemanfaatan aset. Lebih lanjut dalam wawancara bersama Pak Carik Krisna Cahyana menegaskan bahwa “*sebagian besar aset kami manfaatkan dengan bekerjamu dengan berbagai pelaku usaha baik itu yang menyewa tanah kas, bagi hasil, dan hak guna bangunan*”. Artinya peran BUMkal dalam hal ini hanya sebatas badan yang menjalankan atau pihak yang dipercayakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk mengelola aset tetapi tidak dimanfaatkan dengan konsep ekonomi mandiri.

Kemudian dari itu lembaga komersial seperti BUMKal harusnya melihat potensi sumber daya alam sebagai dasar aktivitas ekonomi masyarakat. Namun disisi lain sebagian aktivitas ekonomi yang dikelola oleh BUMKal mengarah pada sistem *incentive and disincentive*. Artinya optimalisasi aset hanya mengarah pada sewa-menyewa. Walaupun dalam pembangunan potensi dengan mengikuti prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk mendukung jalannya pemerintahan di Kalurahan Girikerto dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan sebagai berikut; **2015** (Rp.98.000.000.00), **2016** (Rp.118.400.001.00), **2017** (Rp.193.000.000.00), **2018** (Rp. 180.000.000.00), **2019** (Rp.207.125.000.00), **2020** (Rp.229.00.000.00). sebuah peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dengan proses pembangunan dan pembentukan pengelolaan yang progresif. Sehingga pada progresif tahun 2024 Pemerintah Kalurahan mengalami peningkatan yang signifikan dengan Pendapatan Asli Kalurahan mencapai Rp. 493.102.000.000. Maka peran lembaga-lembaga komersial seperti BUMKal mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga tradisi berdesa harus dihidupkan oleh lembaga-lembaga desa dalam hal ini BUMKal Gerbang Merapi.

UU Desa telah membawa manfaat bagi masyarakat dengan kewenangan skala lokal tanpa melalui birokrat yang panjang. Artinya melalui UU Desa Pemerintah Kalurahan diberi kebebasan melaksanakan pemerintahan dengan mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dengan berlandaskan potensi lokal dengan menjaga dan melindungi serta mampu memberikan distribusi sosial ekonomi. Dalam wawancara mendalam bersama Pak Saefudin mengatakan bahwa:

“Pendapatan atas aset yang dikelola mengalami berlandaskan peningkatan pendapatan yang cukup besar ditahun ini. Masyarakat juga terbantu dengan adanya potensi desa wisata dan aset-aset berkat konsistensi masyarakat dalam pembangunan BUMKal. Masyarakat yang mempunyai usaha mandiri kami tetap rangkul dan juga yang bergabung dengan kelompok UMKM pasti akan terlibat diberbagai kegiatan yang diselenggarakan diberbagai *event*”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Dalam UU Desa sudah jelas berbicara soal asas yang melihat desa secara utuh yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Dari wawancara mendalam di atas peneliti melihat bahwa asas rekognisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi melalui BUMKal ada sebuah proteksi terhadap ekonomi individu. Masyarakat dengan usaha mandiri juga tidak diabaikan artinya masih terdapat kesamaan status dan posisi, serta keberagaman atas nama keadilan (RY Gatot Raditya, Hardjono, Jaka Triwidaryanta, 2022). Sehingga dalam pengertian yang dasar rekognisi dipahami sebagai pengakuan terhadap sosial lokal masyarakat atau hak asal-usul yang mengarah pada prinsip besar yaitu adil dalam sosial ekonomi.

Lebih tegas lagi peneliti jelaskan mengapa Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal harus memahami konsep dasar melakukan pembangunan ekonomi? Pengakuan terhadap desa kedudukan dan kewenangan serta hak asal usul maupun struktur pemerintahan merupakan eksistensi lokal yang harus dijaga sehingga proses-proses dalam pengelolaan dengan peningkatan ekonomi desa sampai pada distribusi sosial ekonomi. Sehingga subsidiaritas menjadi asas yang lengkap dalam hal melihat urusan lokal, urusan lokal menjadi kewenangan desa, dan tanpa ada intervensi dari atas. Dengan demikian Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal Gerbang Merapi harus memahami persoalan ini, yang dimana dalam menciptakan aktivitas ekonomi harus

berlandaskan potensi lokal, partisipatif masyarakat, serta sosial budaya. maka tujuan BUMKal yaitu kepentingan ekonomi agar melihat Kalurahan sebagai subjek pembangunan ekonomi mandiri dengan prakarsa dan aset desa untuk kepentingan bersama.

Dalam wawancara lanjutan bersama Sriwidayati anggota Bumkal dan pengelola susu kambing, lebih tegas mengatakan bahwa

“Kehadiran bumkal gerbang merapi telah membawa perubahan bagi masyarakat terutam dibidang ekonomi, misalnya disana banyak yang bekerja dari masyarakat sini seperti di susu kambing, unggas, dan wisata. Artinya bumkal nya bagus dapat membantu masyarakat agar meningkatkan ekonomi bahkan melatif masyarakat seperti adanya bimbingan dari pemerintah daerah sering diadakan oleh BUMKal”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Dari wawancara diatas memperlihatkan bagaimana peran BUMKal dalam membantu masyarakat meningkatkan ekonomi melalui unit-unit usaha yang telah dibangun oleh BUMKal. Dengan demikian BUMKal Gerbang Marapi sebagai lembaga ekonomi berdasarkan pengamatan peneliti mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun dalam mencapai progresivitas ekonomi masyarakat yang stabil belum cukup baik. Karena hasil pengelolaan yang dilakukan oleh BUMKal terdapat hasil kerja sama tanpa melihat potensi sumber daya hasil alam masyarakat seperti cabai, salak, dan harga pangan lainnya yang dipegang oleh pengepul atau tengkulak. Artinya BUMKal sebagai lembaga sosial komersial belum cukup menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat seperti lapangan pekerjaan, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan potensi, harga pasar, serta bergantung pada poros pembangunan ekonomi dengan sistem usaha bersama dan sewa. Sehingga masyarakat dengan

pendapatan alam nya dan harga pasar dimainkan oleh tengkulak dan tentu hal tersebut terjadi karena dampak akses pasar yang sulit.

### **3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi**

BUMKal Gerbang Merapi sejak 2014 telah dibangun dan digagas dengan memperhatikan potensi yang dimiliki. Pengelolaan yang baik dapat dilihat dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan peran BUMKal dalam memproteksi aset yang dimiliki. Pengelolaan aset, keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, serta peran ekonomi menjadi tolak ukur kemampuan Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal dalam mengorganisir dan memanfaatkan aset. Dalam hal ini peran pengelolaan yang dilakukan oleh BUMKal dalam pemanfaatan dan proses proteksi serta distribusi hasil pengelolaan potensi seperti Desa Wisata Pancoh, Kampung Wisata Dalaman Asri atau Kawidasari, Wisata Salak Kusuma Mulya, dan Tegal Loedood, adalah bidang usaha kerja sama yang sedang dijalankan oleh BUMKal sebagai media peningkatan sosial ekonomi.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Eko, 2014) mengelompokkan usaha BUMDesa yang dapat dibagi dalam beberapa tipe usaha, antara lain; *Brokering* (usaha perantara), *Holding* (usaha bersama), *Social Businnes* (bisnis sosial), *Finansial Bussines* (bisnis keuangan), *Trading* (Perdagangan), dan *Renting* (Persewaan). Kaitannya dengan model pengelolaan berdasarkan potensi aset yang dikelola BUMKal Gerbang Merapi tergolong dalam tipe usaha *holding*, *trading*, *social bussnis*, serta *renting*. Lebih jelas yang disampaikan oleh Pak Saefudin antara lain;

“Pengelolaan aset di BUMKal untuk saat ini masih empat usaha yang dikelola sedangkan lainnya dalam bentuk rencana kerja sama dan persewaan. Ke depannya yang akan kami kembangkan oleh BUMKal seperti perdagangan, bagi hasil, dan bentuk kerja sama lainnya merupakan rencana usaha yang akan kami bangun dan perlu peningkatan modal usaha dan itu sudah kami rencanakan ditahun 2024”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Dari wawancara bersama Pak Saefudin pengelolaan unit usaha oleh BUMKal terdiri dari empat usaha antara lain; SPTA (Stasiun Pengisian Air), Sembada Catering, Pengelolaan Susu Kambing, dan Peternakan Unggas. Sedangkan bentuk usaha lainnya yang bergerak merupakan hasil kerja sama dengan masyarakat yang mengelola beberapa potensi seperti desa wisata. Artinya dari unit usaha yang dikelola oleh BUMKal belum cukup kompleks walaupun mengalami peningkatan ekonomi setiap tahunnya. Tetapi dalam pengelolaan sebuah organisasi sosial dan ekonomi peningkatan ekonomi bukan merupakan alat ukur keberhasilan tetapi BUMKal seharusnya menjadi wadah eksponansi aktivitas sosial masyarakat dan dipahami sebagai organisasi usaha yang dimiliki oleh Kalurahan sekaligus sebagai penggerak pembangunan Kalurahan.

Dalam wawancara lebih lanjut bersama dengan Ibu Sriwidayati anggota Bumkal dan pengelola susu kambing mengatakan mengatakan bahwa dengan hadirnya BUMKal dapat membantu masyarakat-masyarakat yang mempunyai usaha seperti susu kambing ini, karena dari sana diberikan bekal berupa pelatihan oleh BUMKal.(Wawancara lanjutan pada tanggal 21 Juli 2025)

Dari peryataan diatas memperlihat bahwa kehadiran BUMKal juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan berusaha bagi masyarakat dengan mengembangkan pegelolaan susu kambing, unggas, bahkan ari tangki walaupun dalam membangun usaha-usaha unit belum

memperhatikan fokus utama kebutuhan masyarakat yaitu potensi sumber daya alam.

BUMKal di Kalurahan Girikerto memberikan gambaran bahwa kehadiran BUMKal tidak hanya sebatas pihak kedua yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menjaga dan merawat aset tanpa melihat perkembangan pembangunan potensi dan keberdayaan masyarakat. Pembangunan Kalurahan ke depannya oleh BUMKal dapat mengambil peranan sentral dalam pembangunan desa wisata yang dikerjasamakan tanpa menghilangkan peran masyarakat lokal sebelumnya, agar dalam pengelolaan tidak terjadi *hybrid institutions* yang menimbulkan konflik sosial. Wawancara bersama Pak Carik Krisna Cahyana menegaskan “*memang dalam pengelolaan potensi tidak semua diakuisisi oleh BUMKal tetapi melalui kerja sama BUMKal akan mengambil peran didalamnya*”. Dari pernyataan tersebut menunjukkan BUMKal Gerbang Marapi nyaman dengan usaha perdagangan tanpa melihat keberdayaan masyarakat. Artinya walaupun didalamnya terdapat desa wisata yang dikelola tetapi BUMKal harus ingat perannya sebagai organisasi yang berwatak sosial.

Model pengelolaan oleh BUMKal Gerbang Merapi di Kalurahan Girikerto berfokus pada usaha perdagangan, sewa, dan kerja sama antara lembaga pengelola potensi di Kalurahan Girikerto. Secara sederhana peneliti akan memberikan gambaran pengelolaan BUMKal Gerbang Merapi pada gambar dibawa ini.

**Bagan 3. 1**  
**Model Pengelolaan Unit Usaha BUMKal Gerbang Merapi**



Jenis usaha BUMKal Gerbang merapi dapat dilihat pada model pengelolaan di atas yang dimana unit usaha BUMKal hanya terdapat empat unit usaha dengan model pengelolaan perdagangan. Selebihnya adalah hasil kerja sama atau *holding*. BUMKal Gerbang Merapi dalam pengelolaan usaha unggas merupakan salah satu usaha yang dimiliki mengarahkan pada poros peningkatan PAKal. Dalam wawancara mendalam bersama Pak Carik Krisna Cahyana mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BUMKal tidak hanya kami pastikan peningkatan ekonomi tetap berjalan, juga kami perhatikan agar masyarakat terserap dalam pengelolaan tersebut. Mbak penyerapan tenaga kerja tidak hanya dilakukan oleh BUMKal tetapi juga oleh lembaga-lembaga lainnya di setiap padukuhan terutama dibidang pariwisata yang dikelola oleh pokdarwis. Jadi kalau berbicara soal tanggung jawab sosial mungkin tidak banyak yang kami perbuat, namun sedikit membantu keringanan untuk keberdayaan masyarakat”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Peningkatan aktivitas ekonomi akan mengikuti kebutuhan tenaga kerja. Kehadiran BUMKal juga memberikan kontribusi sosial terhadap masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui potensi. Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam ketersediaan lapangan pekerjaan tidak hanya diwadahi oleh BUMKal tetapi oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti ekowisata pancoh, bumi perkemahan, dan peningkatan usaha makanan produk lokal Girikerto. Berdasarkan data BUMKal Gerbang Merapi pada tahun 2024 membutuhkan dan menyerap tenaga kerja pada desa wisata Girikerto 60 orang, pengelolaan susu kambing 120 orang, peternakan kambing 20 orang, Catering 30 orang, SPTA 15 orang, Unggas 5 orang, Bumi Perkemahan 30 orang, dan Perdagangan 10 orang (RPJMKal Girikerto, 2024).

Hasil pengamatan peneliti melihat sebum hadirnya BUMKal masyarakat pada umumnya masih fokus pada bidang pertanian dan peternakan sesuai dengan kondisi di Kalurahan. Bahkan pendapatan dan lapangan pekerjaan bergantung pada hasil alam serta masih terdapat pengangguran karena pada dasarnya perusahaan di sekitar Kalurahan Girikerto tidak ada. Kehadiran BUMKal berhasil membangun aktivitas ekonomi lewat pemanfaatan lahan dan usaha-usaha yang dikelola. Akhirnya berhasil menghilangkan problem sosial yaitu pengangguran di Kalurahan Girikerto.

Dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh BUMKal tersebut menunjukkan peran sosial dalam pengelolaan potensi Kalurahan memberikan dampak pada setiap orang di Padukuhan. Karena pengelolaan potensi-potensi dan aset Kalurahan terserap diberbagai Padukuhan. Namun pada faktanya keseimbangan antara potensi kebutuhan tenaga kerja tidak selaras dengan

jumlah penduduk di Padukuhan. sehingga Pemerintah Kalurahan bersama BUMKal harus menjadi jembatan sosial dan ekonomi dengan menciptakan alternatif baru bagi masyarakat seperti peningkatan produk lokal hasil alam melalui desa wisata, peran budaya melalui desa budaya, dan peran ibu dan anak melalui desa prima. Artinya kolaborasi dalam membangun keberdayaan masyarakat mampu menciptakan ekonomi baru tanpa meninggalkan kearifan lokal walaupun secara pengelolaan berbeda.

Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dasar pengelolaan BUMKal Gerbang Merapi di Kalurahan Girikerto mengarah pada model pengelolaan kerja sama, sewa-menyewa, perdagangan, dan sosial bisnis. Potensi yang dikelola oleh BUMKal berdasarkan model pengelolaan antara lain; sewa gedung, sewa tanah kas desa, pengelolaan unggas, peternakan susu kambing, desa wisata, pengadaan air bersih, dan usaha makanan kuliner. Dari potensi-potensi tersebut diperuntukkan dalam bentuk hak guna pemanfaatan dan bagi hasil, sehingga dalam pengelolaan potensi oleh BUMKal membantu meningkatkan pendapatan kalurahan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam memainkan peran sosial ekonomi kemampuan memproteksi dan distribusi harus sesuai dengan tujuan organisasi yaitu kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini, peran Pemerintah Kalurahan harus menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai sektor seperti sosial budaya, wisata, dan produk lokal hasil alam melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga kehadiran BUMKal Gerbang Merapi cukup membawa dampak bagi masyarakat dan pendapatan kalurahan dengan menciptakan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

## **B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Dampaknya Bagi Kemakmuran Masyarakat**

Hadirnya BUMKal Gerbang Merapi telah membawa perubahan sosial ekonomi di Kalurahan Girikerto sejak 2015 dengan pendapatan 4,7 % dengan akumulasi pendapatan transfer sebesar 91,1 % dan pendapatan lainnya 0,3 % (RPMJKal Girikerto, 2024). Pendapatan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 5,% merupakan hasil pengelolaan potensi Kalurahan. Kemudian dalam pengelolaan BUMKAL kaitannya dengan kontribusi sosial ekonomi dan distribusi hasil kepada masyarakat merupakan tujuan pembangunan BUMKal dengan pemanfaatan potensi sesuai dengan visi BUMKal Gerang Merapi.

Wawancara lebih lanjut bersama Pak Saefudin *“dalam pengelolaan BUMKal masyarakat memang ikut didalamnya secara tidak langsung sudah kita berdayakan”*. Argumentasi tersebut menunjukkan watak Pemerintahan Kalurahan yang sesungguhnya yang mana memahami konsep pemberdayaan sebatas menarik masyarakat untuk terlibat, padahal pemberdayaan dimaknai sebagai pembangunan jangka panjang dengan ciri khas memperkuat yang lemah, bersaing pada jangkauan ekonomi pasar, serta menjadikan masyarakat sebagai objek dalam konsep pembangunan yang mengabaikan humanisme. Lebih tegas pemberdayaan yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah peningkatan produktivitas ekonomi yang sentralistik. Dalam (Soetomo, 2006) melihat pola hubungan masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial ekonomi bersifat horizontal berdasarkan nilai-nilai sosial yang berpusat pada masyarakat dan tentu berkelanjutan. Artinya keberlanjutan BUMKal ke depannya di Kalurahan Girikerto dipengaruhi oleh skala jangka panjang dan jangkauan pasar untuk kesejahteraan masyarakat.

Maka dalam pengelolaan potensi dan dampaknya selaras dengan konsep pemberdayaan yang disampaikan oleh (Sutoro Eko, 2014) yaitu penguatan pada bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Artinya di dalam pengelolaan potensi oleh BUMKal tidak lagi menghadirkan perspektif lama terhadap pembangunan Kalurahan dalam tubuh BUMKal. Namun berdasarkan pengamatan peneliti melihat dampak ekonomi dalam pengelolaan potensi justru menjadikan masyarakat tidak berdaya saing, mandiri, mengakses pasar, dan distribusi pasar karena keterbatasan sumber daya manusia belum memiliki daya tawar merupakan dampak dari memahami pemberdayaan sebatas keterlibatan pengelolaan potensi. Hingga saat ini akses terhadap pasar merupakan tugas yang belum diselesaikan oleh BUMKal Gerbang Merapi.

Sedangkan pada keberdayaan pada bidang politik dan sosial budaya sudah pada jalan pemberdayaan. Karena dalam awal pembentukan BUMKal sampai pada tahap pengelolaan dijalankan berdasarkan hasil musyawarah sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh BUMKal dan Pemerintah Kalurahan melalui kesepahaman proses politik masyarakat lokal. Sosial budaya menjadi instrumen masyarakat Kalurahan dengan nilai lokal serta pemahaman terhadap aturan sosial terbentuk melalui desa budaya yang dirintis oleh Pemerintah Kalurahan. Maka dampaknya telah membawa masyarakat lokal mempertahankan kebudayaan melalui program Pemerintah Daerah yaitu Kalurahan Mandiri Budaya.

Wawancara lebih mendalam persoalan dampak pengelolaan potensi yaitu sosial ekonomi dengan Pak Rudy Sekretaris BUMKal mengatakan bahwa:

“Pada intinya hasil pengelolaan itu kami akan disalurkan melalui rancangan APBKAL yang akan kami rancang ke depannya dan itu tertuang dalam PAkal Mbak pada tahun ini. Semuanya hasil dari pengelolaan unit usaha tetapi untuk pengembangan-pengembangan potensi lagi kami sedikit kewalahan pada anggaran. Sedangkan pada pengelolaan susu kambing untuk distribusinya terbatas sehingga perlu modal lagi untuk usaha lainnya”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

BUMKal selain sebagai lembaga sosial dan ekonomi bukan hanya bersandar pada aktivitas ekonomi, tetapi mengandung sebuah prinsip berdemokrasi dan bermodal sosial seperti kepercayaan, antisipatif, akuntabilitas, kolektivitas, dan menjadi arena pembelajaran bagi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas. Dari wawancara di atas menunjukkan adanya distribusi hasil pengelolaan melalui APBKAL yang dirancang untuk keberlanjutan. Walaupun dalam peningkatan dan pengembangan potensi terbatas dari segi anggaran.

Adapun rancangan penyaluran anggaran dalam APBKAL Girikerto tahun 2024 yang berasal dari PAKal antara lain: Penyediaan pengganti penghasilan tambahan sebesar Rp. 7.200.000, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Kalurahan Rp. 31.690.000, Belanja Modal Rp. 28.000.000, belanja barang dan jasa Rp. 3.590.000, penyediaan aset pemerintahan Rp. 31.590.000, pengelolaan perpustakaan desa Rp. 2.425.000, Pengelolaan kearsipan pemerintah desa Rp. 19.380.000, penyuluhan tentang kependudukan dan capil Rp. 2.425.000, penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa Rp. 13.440.000, Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, LP, dll) 15.800.000, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa Rp. 68.760.000, Pengelolaan keuangan desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll) Rp. 14.078.000, administrasi pertanahan Rp. 6.000.000,

penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho, dll) Rp. 2.130.000, sub bidang pariwisata Rp. 15.360.000, pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa Rp. 10.000.000, fasilitasi dan pendampingan budaya lokal Rp. 10.000.000, pembinaan Karang Taruna Rp. 11.000.000, peningkatan aparatur desa Rp. 70.000.000, pemberdayaan perempuan Rp. 20.000.000, dan pada bidang kegiatan penanggulangan bencana Rp. 10.000.000 (APMKal Girikerto, 2024).

Dari data rancangan APBKal di atas menunjukkan penyaluran anggaran masih terdapat sifat administrasi teknokratis terhadap tubuh Pemerintah Kalurahan. Artinya dalam pembangunan desa dan tradisi berdesa tidak lagi melihat unsur pembangunan dengan emansipasi bermasyarakat dan bernegara. Kemudian Pemerintah Kalurahan dalam hal ini juga menjadikan dan melaksanakan pemerintahan bersifat administrasi formalis dan mengabaikan modal sosial yaitu basis kehidupan dan penghidupan (Sudirno et al., 2020). Sehingga Pemerintah Kalurahan dengan kekuasaan dan pemerintahannya yang didalamnya terdapat otoritas dan akuntabilitas berdasarkan asas rekognisi tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, maka legalitas atas *trus* kedepanya justru luntur karena ketidakmampuan menyalurkan hasil potensi ekonomi kepada masyarakat.

Sesuai dengan kondisi ekonomi dan pendapatan kalurahan tentu ini berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya belum mampu menjawab masalah pokok yang dihadapi diantaranya pendidikan, pendapatan masyarakat, dan kesehatan. Tentu akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat pada dasarnya

kesejahteraan tidak hanya persoalan angka pendapatan tetapi lebih pada hal dasar yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Di bawah ini dapat dilihat kesejahteraan masyarakat Kalurahan Girikerto sebagai berikut;

**Tabel 3. 1**  
**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Girikerto**

<b>Tingkat Kesejahteraan</b>	<b>Miskin</b>	<b>Rentan Miskin</b>	<b>sejahtera</b>	<b>Jumlah KK</b>
JUMLAH	425	1028	1386	2839

Sumber : *RPJMKAL Girikerto Tahun 2021 – 2026*

Dari tabel 3.1 diatas menunjukkan jumlah keluarga miskin dan rentan miskin masih cukup banyak dari jumlah kepala keluarga artinya peningkatan ekonomi yang dialami oleh Kalurahan Girikerto setiap tahunnya belum cukup membantu melakukan stabilisasi dalam pendapatan keluarga. Tidak heran apa yang disampaikan oleh Carik Kalurahan berkaitan dengan kesehatan yaitu stanting masih terdapat di Kalurahan Girikerto. Iya mengatakan kepada peneliti “memang kami setiap tahun mengalami peningkatan pendapatan kalurahan yang cukup bagus tapi itu belum bisa mengatasi beberapa masalah misalnya anak-anak masih ada yang mengalami stanting”.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pendapatan dan peningkatan ekonomi yang dialami oleh Kalurahan Girikerto cukup berdampak terhadap pembangunan yang mana memfokuskan pada pemberdayaan kelompok peternak, tani, dan bantuan pendidikan kepada tiga anak sekolah dasar di setiap sekolah. Hal tersebut cukup baik, namun kurang memfokus pada problem keluarga miskin dan rentan miskin. Makanya dengan hadirnya BUMKal

seharusnya bisa mengatasi hal tersebut karena dapat membantu meningkatkan pendapatan pada setiap tahunnya.

Lebih lanjut dalam wawancara mendalam bersama Pak Rudy, mengatakan sebagai berikut:

“BUMKal selama menjalankan usaha-usaha telah memberikan dampak kepada masyarakat terutama pada ekonominya. Misalnya usaha makanan lokal, pameran budaya, dan ikut andil dalam pengelolaan unit usaha lainnya”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Argumentasi yang disampaikan oleh Pak Rudy terkesan melihat dampak ekonomi masyarakat sebatas partisipatif dan mendapatkan hasil komisi, padahal lebih dari itu yang mana kemampuan distribusi hasil pengelolaan merupakan landasan atas penghidupan pengelolaan potensi Kalurahan. Dengan itu kewenangan lokal skala desa yang tertuang dalam UU Desa seharunya menjadi instrumen dalam mengatur urusan publik dengan tujuan kepentingan bersama, namun Pemerintah Kalurahan tidak cukup memahami itu sebagai penggerak dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam wawancara bersama Pak Gowo Masyarakat Kalurahan Girikerto menjelaskan kepada peneliti soal akses sosial ekonomi bahwa:

“disini memang banyak yang diperbuat oleh BUMKal atas ekonomi masyarakat, tetapi kan tidak semunya disana bergabung. Bagaimana dengan masyarakat kecil lainnya misalnya petani yang memang fokus dibidang pertanian. Makanya bagi saya tidak masalah jika BUMKal semunya baik itu aset dan sejenis lainnya, yang terpenting benar-benar memperhatikan masyarakat kecil itu aja Mbak”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Dengan itu, hasil pengelolaan potensi oleh BUMKal Gerbang merapi telah berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan dengan jumlah pendapatan yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas tetapi peran Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan dan distribusi sosial kepada

masyarakat tidak sesuai dengan visi BUMKal yaitu untuk kesejahteraan. Rata-rata pendapatan usaha tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya artinya pendapatan hasil pengelolaan seharusnya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat. Pada dasarnya dalam penyerapan tenaga kerja tidak semuanya mengambil bagian didalamnya. Sehingga peran Pemerintah Kalurahan dalam memanfaatkan pendapatan usaha oleh BUMKal dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat agar terberdaya baik secara ekonomi, *soft skill*, dan pengetahuan.

Berdasarkan pada tabel 2.2 tentang mata pencarian penduduk didominasi oleh petani yang berjumlah 3.375 dengan presentasi 69,00%. Artinya kondisi masyarakat adalah masyarakat agraris yang memanfaatkan lahan untuk penghasilannya. Namun disisi lainnya jika dilihat dari kendala yang dijelaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikerto tahun 2025 masih mengalami keterbatasan fisik berupa saluran irigasi walaupun ketersediaan air cukup untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut telah dibangun embung sebagai salah satu solusi alternatif untuk memaksimalkan potensi. Dalam wawancara bersama pak Marseh masyarakat Girikerto mengatakan;

“Kalurahan disini pekerjaannya mayoritas petani seperti pengelolaan sawah, salak, cabai, dan tanaman sayur-sayuran lainnya. Ya, kadang bingung pendapatan dan pengeluaran itu tidak seimbang bahkan mungkin malah rugi mbak, makanya pendapatan masyarakat tergantung pada hasil panen dan harga ke tengkulak”.(Wawancara, 11 Juli 2024)

Dalam konteks pengelolaan usaha dengan tujuan peningkatan ekonomi oleh BUMKal telah berdampak pada pendapatan Kalurahan, walaupun BUMKal dalam pengelolaan belum cukup sentral mengelola potensi, BUMKal

berhasil menjadi *holding* antara lembaga tentu bagi hasil akan berjalan sesuai dengan peraturan. Artinya secara dampak ekonomi bagi lembaga pemerintahan dan badan usaha terus berjalan tetapi bagi masyarakat belum tentu dan tidak kontekstual. Karena dalam distribusi yang lakukan hanya beberapa yang mengarah pada pemberdayaan yaitu pada perempuan dan kelompok komunitas dalam Pemerintah Kalurahan. Padahal dalam pengamatan peneliti melihat ada problem yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan dan BUMKal yaitu pada Sumber daya manusia, modal usaha, akses pasar, dan upaya peningkatan usaha produk lokal.

Berdasarkan hal tersebut bagi peneliti melihat bahwa Pemerintah Kalurahan seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat dengan pemanfaatan BUMKal dengan penyertaan modal yang lebih besar. Jadi temuan paling dasar dan kompleks dalam hal ini adalah kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam memaksimalkan potensi belum maksimal yang mana akan menimbulkan adanya keraguan otoritas kelembagaan oleh masyarakat ke depannya karena ketidakmampuan menyelesaikan dampak hasil potensi maupun distribusi hasil pengelolaan potensi. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Sutoro Eko dalam pendekatan governabilitas yang mana perlu adanya keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, otoritas dan demokrasi, juga pemerintah dan masyarakat, serta politik dan administrasi.

Dapat disimpulkan bahwa dampak pengelolaan potensi terhadap kemakmuran masyarakat Kalurahan Girikerto belum maksimal. walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan 5%, keberhasilan BUMKal Gerbang Merapi menjadi kepanjangan tangan dalam masyarakat

dalam membangun potensi, usaha dagang, dan hubungan kerja sama dengan pihak lainnya menjadi nilai lebih tersendiri. Namun pada proses distribusi sosial ekonomi tidak memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, yang mana lebih banyak disalurkan pada kebutuhan administrasi dan aset pemerintahan dan peningkatan Perangkatan Kalurahan. Dampaknya tidak cukup kompleks bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam pengelolaan-pengelolaan potensi baik oleh BUMKal maupun tempat wisata. Sehingga perlu adanya keseimbangan dalam proses distribusi sosial ekonomi agar tidak menimbulkan ketidak percayaan otoritas pengelolaan oleh masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kalurahan Girikerto merupakan salah merupakan satu Kalurahan dengan yang miliki potensi yang cukup baik sehingga dalam pengelolaannya mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Gerbang Merapi. Adapun beberapa potensi yang dikelola oleh BUMKAL antara lain; PAMDes, Desa Ekowisata Pancoh, Kampung Wisata Daleman Asri, Bumi Perkemahan Lembah Merapi, dan Tegal Loedood, pemanfaatan aset melalui kerja sama, usaha unggas, susu kambing, dan catering. Sejak berdirinya BUMKal dari tahun 2014 masih mengalami kendala pada peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi, maka Pemerintah Kalurahan bersama BUMKal berusaha membangun dan mengelolala potensi ekonomi dengan memperhatikan sumber daya kapasitas dan usaha-usaha yang dijalankan.

BUMKal Gerbang Merapi dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga sosial mempunyai usaha-usaha dengan bekerja sama dengan berbagai komunitas masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan yang bergerak di pengelolaan susu kambing. upaya tersebut merupakan program usaha yang dibangun oleh BUMKal

Kehadiran BUMKal Gerbang Merapi cukup optimal walaupun tidak ada keseimbangan antara potensi dan usaha yang dijalankan BUMKal. Sebagai lembaga ekonomi BUMKal Gerbang Merapi berhasil meningkatkan ekonomi kalurahan setiap tahunnya. Namun dalam mencapai progresivitas ekonomi

masyarakat yang stabil belum cukup baik dilihat dari tingkat kesejahteraan, pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga. Karena hasil pengelolaan yang dilakukan oleh BUMKal terdapat hasil kerja sama tanpa melihat potensi sumber daya hasil alam masyarakat seperti cabai, salak, dan harga pangan lainnya yang dipegang oleh pengepul atau tengkulak. Artinya BUMKal sebagai lembaga sosial komersial belum cukup menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat seperti peningkatan kemampuan dalam pengelolaan potensi, harga pasar yang tidak stabil, serta bergantung pada poros pembangunan ekonomi dengan sistem usaha bersama, sewa, dan perdagangan sehingga masyarakat dengan pendapatan alam nya dan harga pasar yang dimainkan oleh tengkulak dan tentu hal tersebut terjadi karena dampak akses pasar yang sulit.

Dasar pengelolaan BUMKal Gerbang Merapi di Kalurahan Girikerto mengarah pada model pengelolaan kerja sama, sewa-menyewa, perdagangan, dan sosial bisnis, maka kapasitas BUMKal belum maksimal dalam memanfaatkan pengelolaan aset dan manajemen organisasi belum cukup baik karena sumber daya manusia yang belum maksimal serta penyediaan bidang usaha keorganisasian BUMKal belum sesuai dengan kondisi masyarakat di Kalurahan Girikerto yang identik dengan masyarakat petani dan peternak.

Dampaknya kemakmuran masyarakat Kalurahan Girikerto belum maksimal yang mana masih terdapat masyarakat miskin, stunting, dan akses pendidikan tinggi masih rendah. Walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan 5%. Keberhasilan BUMKal Gerbang Merapi menjadi kepanjangan tangan dalam masyarakat dalam membangun potensi, usaha dagang, dan hubungan kerja sama dengan pihak lainnya menjadi nilai lebih

tersendiri. Namun pada proses distribusi sosial ekonomi tidak memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian lebih banyak disalurkan pada kebutuhan administrasi dan aset pemerintahan dan peningkatan Perangkat Kalurahan. Dampaknya tidak cukup kompleks bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam pengelolaan-pengelolaan potensi baik oleh BUMKal maupun tempat wisata. Sehingga perlu adanya keseimbangan dalam proses distribusi sosial ekonomi agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan otoritas pengelolaan oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran berdasarkan temuan penelitian sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi oleh Pemerintah Kalurahan Girikerto dan BUMKal Gerbang Merapi antara lain:

1. Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal dalam mengelola potensi dan usaha dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas serta pemetaan potensi anak muda yang sudah menempuh pendidikan yang cukup.
2. Peran BUMKal dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai lembaga sosial harus lebih seimbang dalam membangun dana melaksanakan program-program sosial, sehingga tidak hanya berpatokan pada penyaluran air bersih.

3. Penyaluran anggaran harus lebih memperhatikan belanja sosial dari pada sekedar kelengkapan administrasi pemerintahan yang akhirnya kesenjangan sosial tetap ada.
4. Kapasitas BUMKal Gerbang Merapi lebih diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan usaha bidang keorganisasian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Usaha-usaha yang ditidak dikelola oleh BUMKal sebaik nya masuk dalam manajemen BUMKal seperti wisata-wisata yang dikelola oleh lembaga masyarakat. Dampaknya tidak hanya pemerataan distribusi ekonomi tetapi tentu tidak akan menimbulkan konflik horizontal karena pengelolaannya satu pintu.
6. Memaksimalkan potensi alam seperti salak, cabai dan produk lokal agar memotong rantai tengkulak dan yang paling penting adalah menjangkau pasaran
7. Mendorong masyarakat dengan pendidikan tinggi dengan memberikan fasilitas beasiswa
8. Memberikan bantuan sosial dan bantuan usaha kecil kepada masyarakat miskin melalui pengelolaan pendapatan BUMKal

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-168.
- Bin Abdullah, H. (2021). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 204–222. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.810>
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*. [http://www.academia.edu/download/34492495/Buku\\_Desam\\_Membangun\\_Indonesia\\_Sutoro\\_Eko.pdf](http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desam_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf)
- Fatimah, A. S. (2021). Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1), 40–62. <http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/58>
- Hasanah, N. (2019). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *QIEMA: Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, 5(1), 14-45.
- J.W. Creswell. (2023). ‘Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15-21
- Nindito, S. (2005). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial. *Jurnal ilmu komunikasi*, 2(1).
- Pajarianto, H., Ajigoena, A. M., Pd, S., & PRIBADI, I. LAPORAN TAHUN I.Sudirno, D., Masduki, M., Suparto, L., Nahdi, D. S., & Sumianto, T. (2020). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapan Desa Panjalin Kidul. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 53-58.
- Rahmadani, G., Basori, Y. F., & Meigawati, D. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(1), 193-204.
- RY Gatot Raditya, Hardjono, Jaka Triwidaryanta. (2022). Pemanfaatan Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Bleberan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i1.172>

Soetomo. 2006. *Strategi -Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Misi, Dan Semangat UU Desa*.

Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung

Sudirno, D., Masduki, M., Suparto, L., Nahdi, D. S., & Sumianto, T. (2020). PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAPAN DESA PANJALIN KIDUL. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 53–58. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i1.155>

Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. *Journal of Rural Studies*, 54, 360-371.

Yulianto, Y., Diana, S., Fahmi, T., Hidayati, D. A., & Inayah, A. (2021). Pemetaan Potensi Desa-Prukades dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas BUMDES di Pekon Sukabanjar, Lumbok Seminung, Lampung Barat. Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat, 2(1), 1-8.

### **Perundang-Undangan**

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Bandan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Peraturan Desa Peraturan Desa No.4 Tahun 2021 tentang membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan “Gerbang Merapi”

### **Dokumen-Dokumen**

APBKal Pemerintah Kalurahan Girikerto Tahun 2024

RPJMKal Pemerintah Kalurahan Girikerto 2021-2026

Profil Badan Usaha Milik Kalurahan Gerbang Merapi 2024

## LAMPIRAN



### YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SAKALI  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SAKALI  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SAKALI  
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

### SURAT TUGAS Nomor : 264/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Astria Estu Laili  
Nomor Mahasiswa : 20520158  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman  
b. Sasaran : Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan sebagai Lembaga Sosial dan Komersial dalam Peningkatan Kemakmuran Warga  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 2 Juli 2024  
Ketua  
15  
YOGYAKARTA  
11  
Sitoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190

#### PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

#### MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 535/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Astria Estu Laili  
No Mhs : 20520158  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan sebagai Lembaga Sosial dan Komersial dalam Peningkatan Kemakmuran Warga  
Tempat : Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman  
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KAPANEWON TURI  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO  
کالروهان گریکرتو  
Alamat : Soprayan, Girikerto, Turi, Sleman, 55551  
Telp: 0851-7155-1948  
Email : [desa.girikerto@gmail.com](mailto:desa.girikerto@gmail.com) & [desagirikerto@sleman.ah.go.id](mailto:desagirikerto@sleman.ah.go.id)  
web : [girikerto.sleman.ah.go.id](http://girikerto.sleman.ah.go.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DI KALURAHAN GIRIKERTO

Nomor : 070/111

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Krisna Cahyana, S.H  
b. Jabatan : Carik Girikerto

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Astria Estu Laili

NIM : 20520158

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S1)

Perguruan tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Telah selesai melaksanakan penelitian yang dilaksanakan pada 02 Juli 2024 sampai 02 september 2024 di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman dengan judul "Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan Sebagai Lembaga Sosial dan Komersial Dalam Peningkatan Kemakmuran Warga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Girikerto  
Pada tanggal : 21 Juli 2025

a.n Lurah Girikerto



Krisna Cahyana, S.H.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### Identitas Informan

Nama : .....

Usia : .....

Tingkat Pendidikan : .....

Kedudukan/Jabatan : .....

### **A. Kapasitas BUMKal dalam pembangunan Kalurahan berdasarkan fungsi sosial dan ekonomi.**

1. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan usaha BUMKal?
2. Bagaimana Pemerintah Kalurahan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan ekonomi desa melalui BUMKal?
3. Apa strategi konkret yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan untuk membangun sektor ekonomi dan sosial dalam pembangunan dan pengembangan BUMKal?
4. Apakah ada program edukasi atau pelatihan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat?
5. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalurahan?
6. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan BUMKal, dan bagaimana keterlibatan masyarakat mendukung upaya ini?

7. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan BUMKal dalam konteks pengelolaan ekonomi desa?
8. Apakah terdapat kebijakan atau regulasi khusus yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan?
9. Apa dampak penerapan kebijakan pada hubungan antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan BUMKal?
10. Sejauh mana BUM Desa berperan dalam mendukung pembangunan potensi lokal khususnya pada bidang perkebunan yang dikelola oleh kelompok tadi
11. Dalam proses usaha yang dibangun oleh BUM Desa tentu terdapat kendala seperti harga, gagal panen, dan hama. Bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut?

**B. Manfaat hasil sumber daya bersama secara sosial ekonomi untuk kemakmuran masyarakat**

1. Bagaimana proses pengelolaan BUMKal dalam mempertahankan ekonomi kreatif masyarakat Kalurahan?
2. Apakah hasil sumber daya alam di Kalurahan yang dikelola BUMKal dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal?
3. Apakah ada program atau pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat?
4. Bagaimana kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya dari hasil pendapatan dan peningkatan ekonomi kKalurahan?

5. Bagaimana Pemerintah Kalurahan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan terkait hasil pengelolaan potensi Kalurahan oleh BUMKal?

**2. Meneliti perbuatan dan capaian lembaga formal desa (BUMKal) dan Pemerintah Desa atas pengelolaan potensi lokal**

1. Apakah ada kebijakan atau peraturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Desa untuk mengatur pengelolaan BUM Desa, terutama usaha yang dikelola?
2. Bagaimana pemerintah desa mengevaluasi pencapaian BUMKal dalam aspek sosial dan ekonomi?
3. Apakah terdapat mekanisme partisipatif yang digunakan oleh Pemerintah Kalurahan dan BUMKal untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan sosial ekonomi?
4. Usaha-usaha apa saja yang sedang dikembangkan oleh BUMKal?
5. Bagaimana BUMKal sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial dalam memberdayakan masyarakat?
6. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BUMKal dalam mengelola aset-aset dan potensi yang ada Kalurahan Girikerto

## DOKUMENTASI PENELITIAN



*Foto bersama Ibu endah,  
Masyarakat kalurahan  
Girikerto*



*Foto bersama pak Rudy,  
sekretaris BUMKal  
Girikerto*



*Foto bersama pak*

*Gowo,masyarakat*

*kalurahan Girikerto*



*Foto bersama pak Krisna*

*Cahyana,carik kalurahan*

*Girikerto*



*Foto bersama pak saefudin,  
direktur BUMKAL*



*Foto bersama pak Marseh,  
masyarakat kalurahan  
Girikerto*



Desa ekowisata pancoh,  
salah satu potensi yang  
dimiliki oleh Kalurahan  
Girikerto (dokumentasi  
peneliti)



Wawancara lanjutan setelah  
ujian skripsi bersama Ibu  
Sriwidayati di rumah  
pengelolaan susu kambing